



# Jurnal Penelitian

# POLITIK

Vol.13, No.1, Juni 2016

## KOMUNITAS ASEAN DAN TANTANGAN KE DEPAN

- **Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Pencapaian Cybersecurity melalui ASEAN Regional Forum on Cybersecurity Initiatives**
- **Membaca “PHK Massal”: Rantai Nilai Industri Elektronik, MEA, dan Tantangan Bagi Gerakan Buruh di Indonesia**
- **Transformasi Ruang dan Partisipasi Stakeholders: Memahami Keterlibatan Masyarakat Sipil dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia dalam Proses Regionalisme ASEAN Pasca-2003**
- **Ketahanan Sosial Warga Perbatasan Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN: Studi di Kecamatan Entikong, Kalimantan Barat**

### RESUME PENELITIAN

- **Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru**
- **Problematika Kerja Sama Perbatasan Sepanjang Sungai Mekong antara Tiongkok dan ASEAN Bagian Utara**
- **Strategi Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN**

### REVIEW BUKU

- **Neotradisionalisme dan Distopianisme: Tinjauan atas Tiga Buku Robert D. Kaplan**

Jurnal Penelitian Politik	Vol. 13	No. 1	Hlm. 1-143	Jakarta, Juni 2016	ISSN 1829-8001
------------------------------	---------	-------	------------	-----------------------	-------------------

**Jurnal  
Penelitian Politik**



**Mitra Bestari**

Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI), merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam, serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.

P2P-LIPI sebagai pusat penelitian milik pemerintah dewasa ini dihadapkan pada tuntutan dan tantangan baru, baik yang bersifat akademik maupun praktis kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan dengan otonomi daerah, demokrasi, HAM dan posisi Indonesia dalam percaturan regional dan internasional. Secara akademik, P2P-LIPI dituntut menghasilkan kajian-kajian unggulan yang bisa bersaing dan menjadi rujukan ilmiah pada tingkat nasional maupun internasional. Sementara secara moral, P2P-LIPI dituntut untuk memberikan arah dan pencerahan bagi masyarakat dalam rangka membangun Indonesia baru yang rasional, adil dan demokratis. Karena itu, kajian-kajian yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi praksis kebijakan, tetapi juga pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, khususnya perambahan konsep dan teori-teori baru ilmu politik, perbandingan politik, studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial politik, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional

Prof. Dr. Syamsuddin Haris (*Ahli Kajian Kepartaian, Pemilu, dan Demokrasi*)  
Prof. Dr. Bahtiar Effendy (*Ahli Kajian Politik Islam*)  
Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti (*Ahli Kajian Pertahanan dan Hubungan Internasional*)  
Prof. Dr. Indria Samego (*Ahli Kajian Ekonomi Politik dan Keamanan*)  
Prof. Dr. Dede Mariana (*Ahli Kajian Politik Lokal dan Pemerintahan*)  
Dr. C.P.F Luhulima (*Ahli Kajian Ekonomi Politik Internasional, ASEAN, Eropa*)  
Dr. Nurliah Nurdin (*Ahli Kajian Pemilu dan Pemerintahan*)  
Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA (*Ahli Kajian Otonomi Daerah dan Politik Lokal*)  
Nico Harjanto, Ph.D (*Ahli Kajian Perbandingan Politik*)

**Penanggung Jawab**

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI

**Pemimpin Redaksi**

Dini Rahmiati, S.Sos., M.Si

**Dewan Redaksi**

Adriana Elisabeth, Ph.D (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)  
Dr. Lili Romli (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)  
Drs. Hamdan Basyar, M.Si (*Ahli Kajian Timur Tengah dan Politik Islam*)  
Firman Noor, Ph.D (*Ahli Kajian Pemikiran Politik, Pemilu dan Kepartaian*)  
Kurniawati Hastuti Dewi, Ph.D (*Ahli Kajian Politik Lokal, Gender dan Politik*)  
Moch. Nurhasim, S.IP., M.Si (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)  
Dra. Sri Yanuarti (*Ahli Kajian Konflik dan Keamanan*)

**Redaksi Pelaksana**

Indriana Kartini, MA (*Ahli Kajian Dunia Islam dan Perbandingan Politik*)  
Athiqah Nur Alami, MA (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)

**Sekretaris Redaksi**

Hayati Nufus, S.Hum  
Esty Ekawati, S.IP., M.IP  
Anggih Tangkas Wibowo, ST., MMSi

**Produksi dan Sirkulasi**

Adiyatnika, A.Md  
Prayogo, S.Kom

**Alamat Redaksi**

Pusat Penelitian Politik-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III & XI  
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710  
Telp/Faks. (021) 520 7118, E-mail: penerbitan.p2p@gmail.com  
Website: www.politik.lipi.go.id

**ISSN**

1829-8001

## DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Catatan Redaksi	iii-v
Artikel	
• <b>Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Pencapaian Cybersecurity melalui ASEAN Regional Forum on Cybersecurity Initiatives</b> <i>David Putra Setyawan dan Arwin Datumaya Wahyudi Sumari</i>	1-20
• <b>Membaca “PHK Massal”: Rantai Nilai Industri Elektronik, MEA, dan Tantangan Bagi Gerakan Buruh di Indonesia</b> <i>Fathimah Fildzah Izzati</i>	21-32
• <b>Transformasi Ruang dan Partisipasi Stakeholders: Memahami Keterlibatan Masyarakat Sipil dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia dalam Proses Regionalisme ASEAN Pasca-2003</b> <i>Ahmad Rizky Mardhatillah Umar</i>	33-52
• <b>Ketahanan Sosial Warga Perbatasan Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN: Studi di Kecamatan Entikong, Kalimantan Barat</b> <i>Sandy Nur Ikfal Raharjo</i>	53-68
Resume Penelitian	
• <b>Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru</b> <i>Diandra Megaputri Mengko, dkk</i>	69-82
• <b>Problematika Kerja Sama Perbatasan Sepanjang Sungai Mekong antara Tiongkok dan ASEAN Bagian Utara</b> <i>Awani Irewati, dkk</i>	83-104
• <b>Strategi Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN</b> <i>Khanisa, dkk</i>	105-118
Review Buku	
• <b>Neotradisionalisme dan Distopianisme: Tinjauan atas Tiga Buku Robert D. Kaplan</b> <i>Nanto Sriyanto</i>	119-136
Tentang Penulis	137-138
Pedoman Penulisan	141-145

## CATATAN REDAKSI

Tahun 2016 menjadi tahun yang sangat penting bagi Indonesia dan ASEAN, karenan di permulaan tahun ini Komunitas ASEAN resmi dijalankan. Pembentukan komunitas ini disepakati oleh sepuluh negara anggota ASEAN untuk mewujudkan cita-cita integrasi di antara mereka. Integrasi di kawasan ini juga diharapkan dapat membuka pintu yang lebih lebar bagi peluang kerja sama di tingkat ASEAN, sehingga dapat membawa peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di kawasan ini. Selain peningkatan kesejahteraan di kawasan, hal lain yang juga ingin dicapai oleh ASEAN adalah membangun komunitas yang menguatkan solidaritas di antara anggotanya dan lebih bersifat people-oriented. Di tengah dinamika politik dan ekonomi di tingkat internasional yang semakin kompleks, Komunitas ASEAN diharapkan mampu mendorong sepuluh anggotanya untuk meningkatkan daya saing mereka miliki, sehingga ASEAN siap menghadapi tantangan regional dan internasional yang ada. Dalam membangun komunitas yang dicita-citakan, dibentuklah tiga pilar utama, yaitu: Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN, dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN.

Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN diharapkan mampu menjaga ASEAN untuk tetap berkomitmen dalam memelihara stabilitas dan keamanan di kawasan. Hal ini diperlukan agar ASEAN dapat membangun lingkungan politik yang harmonis yang mampu menghadapi ancaman-ancaman dari luar ataupun potensi konflik di dalam tubuh ASEAN sendiri. Sementara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, ASEAN membangun Komunitas Ekonomi ASEAN dengan tujuan untuk mendorong pergerakan roda ekonomi dan perdagangan antarnegara anggota ASEAN yang mampu bersaing secara sehat. Peningkatan daya saing produk-produk dari masing-masing negara anggota ASEAN diperlukan agar ASEAN dapat mengambil peluang yang besar

dari perdagangan bebas di dunia internasional. Komunitas Ekonomi ASEAN atau yang juga dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) diharapkan dapat memperkecil gap perkembangan ekonomi di antara negara anggota ASEAN dan mampu menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh anggota ASEAN. Selain peningkatan kesejahteraan ekonomi, ASEAN juga mengharapkan terbentuknya masyarakat yang memiliki solidaritas dan rasa kebersamaan yang kuat terhadap ASEAN. Untuk itulah dibentuk Komunitas Sosial Budaya ASEAN. Kedekatan geografis diharapkan tidak hanya mampu menjalin keterhubungan secara fisik di ASEAN, namun juga mampu menjalin keterhubungan di antara masyarakat di kawasan Asia Tenggara.

Implementasi tiga pilar Komunitas ASEAN pada dasarnya akan membawa peluang yang sangat besar bagi ASEAN. Akan tetapi, pemberlakuan Komunitas ASEAN juga harus menghadapi beberapa tantangan yang muncul baik dari dalam tubuh ASEAN ataupun dari luar. Perbedaan tingkat kemajuan di antara negara anggota merupakan tantangan internal yang harus dihadapi ASEAN. Perbedaan tingkat perkembangan ekonomi negara-negara anggota ASEAN dapat menjadi ganjalan integrasi yang ingin dicapai oleh ASEAN, terutama dalam sektor ekonomi. Selain itu, perbedaan kesiapan masing-masing negara dalam menghadapi Komunitas ASEAN juga menjadi tantangan bagi ASEAN. Sementara tantangan dari luar misalnya adalah tantangan yang muncul dari konstelasi politik internasional yang masih didominasi oleh kekuatan-keuatan negara besar, seperti Amerika dan Tiongkok. Sengketa Laut Cina Selatan yang melibatkan empat negara anggota ASEAN (Brunei, Filipina, Malaysia, dan Vietnam) dan Tiongkok apabila tidak dapat dikelola dengan baik dapat menjadi ganjalan bagi kestabilan di kawasan ini.

Bagi Indonesia, Komunitas ASEAN juga membuka peluang yang besar, terutama dalam mendorong peningkatan daya saing yang dimiliki oleh Indonesia. Namun, dilihat dari kesiapannya, peluang yang ada tidak dapat diambil secara optimal oleh Indonesia apabila pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia masih belum memenuhi harapan. Kesiapan sumber daya manusia, tata kelola, pembangunan infrastruktur, kerangka hukum, serta kebijakan pemerintah yang mendorong partisipasi Indonesia dalam Komunitas ASEAN dirasa masih kurang. Dari segi sosial masyarakat, Indonesia masih harus menghadapi kenyataan bahwa kesadaran masyarakat akan Komunitas ASEAN masih rendah. Belum banyak masyarakat yang menyadari arti penting Komunitas ASEAN atau ASEAN sendiri bagi Indonesia. Melihat kenyataan ini, *Jurnal Penelitian Politik* kali ini mengangkat tema “Komunitas ASEAN dan Tantangan ke Depan” untuk melihat lebih lanjut sejauh mana implementasi Komunitas ASEAN akan membawa dampak bagi ASEAN ataupun Indonesia, dan tantangan apa saja yang akan dihadapi di masa mendatang. *Jurnal Penelitian Politik* edisi kali ini menyajikan lima artikel, dan tiga resume hasil penelitian yang telah dilakukan oleh tim-tim penelitian yang ada di Pusat Penelitian Politik LIPI.

Artikel pertama berjudul **“Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Pencapaian Cyber Security Melalui ASEAN Regional Forum on Cyber Security Initiatives”** yang ditulis oleh David Putra Setyawan dan Arwin Datumaya Wahyudi Sumari mencoba membahas tentang upaya Indonesia dalam memanfaatkan ASEAN Regional Forum (ARF) on cyber security initiatives untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam rangka mendukung keamanan nasional di bidang cyber. Kemajuan teknologi, terutama di bidang cyber telah membuat batas antarnegara menjadi semakin kabur. Hal ini memicu munculnya kejahatan dan ancaman nirmiliter di bidang teknologi bagi sebuah negara dalam bentuk ancaman cyber. Untuk menghadapi hal tersebut Indonesia memerlukan strategi untuk melindungi keamanannya. ARF menjadi salah satu forum yang dapat dimanfaatkan Indonesia untuk mengajak negara-negara ASEAN dan negara mitranya untuk bekerja sama dalam

meningkatkan pertahanan dan menjaga stabilitas di kawasan.

Sumber daya manusia juga merupakan salah satu faktor yang perlu mendapatkan perhatian khusus ketika kita berbicara tentang kesiapan Indonesia dalam menghadapi Komunitas ASEAN. Artikel yang ditulis oleh Fathimah Fildzah Izzati yang berjudul **“Membaca ‘PHK Massal’: Rantai Nilai Industri Elektronik, MEA, dan Tantangan bagi Gerakan Buruh di Indonesia”** mencoba melihat dampak pemberlakuan MEA bagi buruh-buruh yang ada di Indonesia. Kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka menyongsong MEA sempat menimbulkan isu “PHK Massal”. Tulisan ini bertujuan untuk menunjukkan peran gerakan buruh dalam menghadapi MEA, terutama dalam bidang industri elektronik.

Artikel berjudul **“Transformasi Ruang dan Partisipasi Stakeholders: Memahami Keterlibatan Masyarakat Sipil dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia dalam Proses Regionalisme ASEAN pasca-2003”** ditulis oleh Ahmad Rizky Mardhatillah Umar. Artikel ini menjelaskan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam dua sektor regionalisasi ASEAN, yaitu Hak Asasi Manusia (HAM) dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Sejak bertransformasi menjadi bentuk ‘Masyarakat ASEAN’ pada tahun 2003, mulai muncul interaksi yang lebih kompleks antara ‘negara’ dan aktor-aktor ‘non-negara’. Artikel ini berargumen bahwa Masyarakat ASEAN telah membuka ruang yang lebih besar untuk mengakomodasi partisipasi ‘pemangku kepentingan’/stakeholders yang ada di dalamnya.

Dengan adanya integrasi di kawasan ASEAN melalui implementasi Komunitas ASEAN, masyarakat yang paling merasakan dampak langsung keterhubungan dan menipisnya batas antarnegara melalui integrasi tersebut adalah masyarakat di perbatasan. Artikel berjudul **“Ketahanan Sosial Warga Perbatasan Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN: Studi di Kecamatan Entikong, Kalimantan Barat”** mencoba mengulas tentang sejauh mana kesiapan yang dimiliki oleh warga di wilayah perbatasan Indonesia dalam menyongsong

pemberlakuan Komunitas Ekonomi ASEAN. Artikel yang ditulis oleh Sandy Nur Ikfal Raharjo ini melihat ketahanan yang dimiliki masyarakat di Entikong melalui enam modal: modal alam, modal sosial, modal keuangan, modal politik/pemerintahan, modal fisik, dan modal manusia. Dari hasil analisis ini direkomendasikan bahwa pemerintah perlu melakukan reoptimalisasi kerja sama lintas perbatasan dengan negara lain untuk meningkatkan ketahanan masyarakat di perbatasan, dan perlu membuat aturankhusus untuk perdagangan lintas batas di dalam MEA.

Selain lima artikel di atas, *Jurnal Penelitian Politik* edisi kali ini juga menampilkan tiga resume penelitian yang telah dilakukan oleh tim-tim penelitian di Pusat Penelitian Politik. Resume penelitian pertama adalah mengenai perkembangan intelegen di Indonesia. Dalam ringkasan penelitian yang berjudul **“Intelejen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru”** yang disusun oleh Ikrar Nusa Bhakti dan Diandra Mengko Megaputri dibahas mengenai perkembangan dinamika intelegen Indonesia terutama pada masa setelah orde baru. Hasil penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran tentang teori intelegen, pergumulan intelijen dan demokrasi di beberapa negara yang mengalami perubahan politik dari sistem otoriter ke demokrasi dan sejarah singkat intelijen di Indonesia, melainkan juga memuat ulasan awal demokratisasi intelijen di Indonesia.

Tim Penelitian yang ada di Pusat Penelitian Politik LIPI pada tahun 2015 juga melakukan penelitian yang terkait dengan Komunitas ASEAN. Salah satunya adalah resume penelitian berjudul **“Problematika Kerja Sama Perbatasan Sepanjang Sungai Mekong antara Tiongkok dan ASEAN Bagian Utara”** yang disusun oleh Awani Irewati, dkk. Pada penelitian ini Tim Perbatasan Pusat Penelitian Politik LIPI melakukan penelitian tentang upaya pembangunan keterhubungan melalui kerja sama lintas perbatasan di sub-kawasan Sungai Mekong antara Tiongkok dengan lima negara ASEAN: Myanmar, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Dalam kerja sama sub-kawasan ini, Tiongkok sebagai negara non-ASEAN menjadi salah satu penggerak aktif kerja sama *Greater Mekong Subregion*. Keterhubungan yang dilihat bukan hanya keterhubungan fisik saja, melainkan juga keterhubungan institusi dan keterhubungan masyarakat. Kerja sama sub-kawasan di ASEAN

sangat penting, terutama untuk mempersempit adanya gap perkembangan antara ASEAN bagian utara dengan negara anggota ASEAN yang lainnya. Dalam artikel ini juga dibahas mengenai peran kerja sama sub-kawasan di ASEAN dalam membangun keterhubungan yang akan mendorong kesuksesan implementasi Komunitas ASEAN.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di awal bahwa salah satu tantangan bagi Indonesia dalam melaksanakan Komunitas ASEAN adalah masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat di Indonesia terhadap Komunitas ASEAN. Hal ini sesuai dengan hasil survey yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Politik pada tahun 2015. Dalam ringkasan penelitian terakhir berjudul **“Strategi Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN”** yang disusun oleh Khanisa, dkk dijelaskan bahwa kesadaran dan pemahamann publik menjadi faktor kunci yang menentukan apakah pilar-pilar yang telah disusun untuk mewujudkan Komunitas ASEAN dapat direalisasikan dengan baik. Hasil penelitian ini menghasilkan beberapa rekomendasi yang ditunjukkan untuk Kementerian terkait. Strategi yang disarankan salah satunya adalah menekankan sebuah upaya berkelanjutan dan memiliki sasaran yang lebih nyata dalam melaksanakan program-program sosialisasi mengenai ASEAN dan Komunitas ASEAN kepada masyarakat.

Catatan redaksi kali ini kami tutup dengan ucapan terima kasih kepada segenap pihak yang telah berkontribusi sehingga *Jurnal Penelitian Politik* edisi kali ini dapat terbit. Terima kasih kami ucapkan untuk penulis, mitra bestari, serta tim pengelola jurnal. Semoga *Jurnal Penelitian Politik* ini dapat bermanfaat dalam memperkaya khasanah keilmuan dan praktis terkait dengan kajian mengenai ASEAN dan Komunitas ASEAN, serta dampaknya bagi Indonesia. Selamat membaca.

## Redaksi

---

**DDC: 324.2598**

**David Putra Setyawan, Arwin Datumaya  
Wahyudi Sumari**

**DIPLOMASI PERTAHANAN  
INDONESIA DALAM PENCAPAIAN  
CYBERSECURITY MELALUI  
ASEAN REGIONAL FORUM ON  
CYBERSECURITY INITIATIVES**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 13 No. 1, Juni 2016, Hal. 1-20**

Perkembangan teknologi informasi di dunia internasional berdampak pada penggunaan ruang cyber yang mencakup semua aspek kehidupan nasional. Dihadapkan pada kondisi ini, pemerintah harus memahami kondisi cybersecurity di Indonesia dan membangunnya agar mampu mengatasi berbagai ancaman yang datang melalui ruang cyber. Selain kondisi internal, ruang lingkup eksternal perlu diperhatikan mengingat ancaman cyber yang bersifat transnasional, melewati batas kedaulatan, dan telah dipandang sebagai ancaman bersama oleh negara-negara di dunia. ASEAN telah menjadi salah satu wadah bagi Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam rangka mendukung keamanan nasional di bidang cyber. Melalui ASEAN Regional Forum (ARF) on cybersecurity initiatives, strategi diplomasi pertahanan diarahkan untuk meningkatkan rasa saling percaya (confidence building measures) antar negara dan mengurangi potensi ancaman yang dapat ditimbulkan dari lingkup eksternal. Upaya tersebut, menghasilkan kesepakatan berupa point of contacts antar negara dan persamaan pandangan untuk terus mengadakan pelatihan cybersecurity dalam bentuk seminar maupun workshop untuk membangun kapasitas sumber daya manusia. Strategi dan upaya tersebut dianalisis melalui pendekatan kualitatif dan data-data primer dikumpulkan melalui

wawancara dengan 15 informan dari berbagai instansi pemerintahan. Selain itu, literatur, jurnal, dan dokumen terkait juga digunakan sebagai data pendukung.

**Kata Kunci:** ARF, confidence building measures, cybersecurity, diplomasi pertahanan

---

**DDC: 324.2598**

**Fathimah Fildzah Izzati**

**MEMBACA “PHK MASSAL”:  
RANTAI NILAI INDUSTRI  
ELEKTRONIK, MEA, DAN TANTANGAN  
BAGI GERAKAN BURUH DI INDONESIA**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 13 No. 1, Juni 2016, Hal. 21-32**

“PHK Massal” sempat menjadi isu dalam politik perburuhan awal tahun 2016 setelah kemunculan paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan dalam rangka menyambut keterlibatan Indonesia dalam MEA. Adanya konstruksi kata “massal” dalam isu PHK ini tidak sejalan dengan data ketenagakerjaan, namun lebih terkait erat dengan politik produksi dalam industri elektronik. Pada sisi lain, kerentanan gerakan buruh di sektor elektronik pun kian meningkat seiring dengan meningkatnya fleksibilitas pasar tenaga kerja dalam rezim pasar bebas, termasuk dalam konteks MEA. Tulisan ini membahas hubungan antara isu PHK massal dengan rantai nilai industri elektronik di tingkat global, MEA, dan tantangan bagi gerakan buruh di Indonesia. Tujuannya untuk menunjukkan peran gerakan buruh dalam menghadapi skema ekonomi seperti MEA terutama di dalam industri elektronik melalui analisis teori rantai nilai. Dengan menggunakan metode kualitatif berupa studi literatur, tulisan ini menemukan bahwa gerakan buruh di Indonesia memiliki

peluang yang besar untuk membangun kekuatan di tingkat regional dengan memosisikan dirinya di dalam rantai nilai global dan rezim pasar tenaga kerja fleksibel.

**Kata Kunci:** PHK Massal, Rantai Nilai Industri Elektronik, Fleksibilitas Pasar Tenaga Kerja, MEA, Gerakan Buruh

---

**DDC: 320.014**

**Ahmad Rizky Mardhatillah Umar**

**TRANSFORMASI RUANG DAN PARTISIPASI *STAKEHOLDERS*: MEMAHAMI KETERLIBATAN MASYARAKAT SIPIL DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH INDONESIA DALAM PROSES REGIONALISME ASEAN PASCA-2003**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 13 No. 1, Juni 2016, Hal. 33-52**

Artikel ini mencoba untuk menjelaskan keterlibatan stakeholders tersebut dalam dua sektor regionalisasi ASEAN: Hak Asasi Manusia (HAM) dan Usaha Kecil & Menengah (UKM). Sejak bertransformasi menjadi bentuk ‘Masyarakat ASEAN’ pada tahun 2003, mulai muncul interaksi yang lebih kompleks antara ‘negara’ dan aktor-aktor ‘non-negara’. Sebelum 2003, ASEAN hanya diposisikan sebagai ‘organisasi internasional’ yang berpusat pada negara anggota sebagai satu-satunya aktor di kawasan. Menyusul diberlakukannya Masyarakat ASEAN pada tahun 2003, artikel ini berargumen bahwa Masyarakat ASEAN telah membuka ruang yang lebih besar bagi kontestasi antara negara dan ‘pemangku kepentingan’/ stakeholders yang ada di dalamnya, terutama kelompok bisnis (konglomerat dan UKM) serta organisasi masyarakat sipil. Dengan menggunakan perspektif kritis, artikel ini mencoba untuk menunjukkan bahwa sebetulnya pola interaksi yang terbangun antara aktor-aktor ‘non-negara’ dan ‘negara’ dalam spektrum Masyarakat ASEAN dimungkinkan oleh interaksi yang kian besar antara aktor-aktor yang ada di dalamnya, sehingga membuka kontestasi antar-stakeholders dalam organisasi regional yang telah bertransformasi. Hal ini kemudian memberikan pemahaman yang lebih kompleks tentang regionalisme di Asia Tenggara. Argumen tersebut akan dijelaskan melalui dua studi

kasus, yaitu aktivitas Organisasi Masyarakat Sipil HAM dan Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia.

**Kata Kunci:** Regionalisme, Partisipasi, Pemangku Kepentingan, Masyarakat ASEAN, Asia Tenggara, Organisasi Masyarakat Sipil, Usaha Kecil & Menengah

---

**DDC: 320.014**

**Sandy Nur Ikfal Raharjo**

**KETAHANAN SOSIAL WARGA PERBATASAN INDONESIA MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN: STUDI DI KECAMATAN ENTIKONG, KALIMANTAN BARAT**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 13 No. 1, Juni 2016, Hal. 53-68**

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah mulai diberlakukan pada akhir tahun 2015, dan akan ditransformasikan menjadi MEA yang inklusif pada tahun 2025. Sebagai penduduk kawasan perbatasan yang pintu gerbang lintas batas Indonesia-Malaysia, masyarakat Entikong harus memiliki ketahanan sosial yang kuat untuk menghadapi semakin bebasnya pergerakan orang dan barang di wilayah mereka. Tulisan ini mengkaji kondisi ketahanan sosial masyarakat Entikong dalam menghadapi MEA tersebut. Dengan menggunakan kerangka Sustainable Livelihood Approach yang dimodifikasi, tulisan ini mengidentifikasi bahwa masyarakat Entikong memiliki empat modal ketahanan sosial yang kuat, yaitu modal alam, modal sosial, modal keuangan, dan modal politik/pemerintahan, serta dua modal yang masih lemah, yaitu modal fisik dan modal manusia. Selain itu, ketahanan sosial masyarakat Entikong juga dibantu dengan pelaksanaan kerja sama lintas Indonesia-Malaysia. Tulisan ini menyarankan reoptimalisasi kerja sama lintas batas dan pengaturan khusus perdagangan lintas batas di dalam MEA.

**Kata Kunci:** Entikong, ketahanan sosial, kerja sama lintas batas, Masyarakat Ekonomi ASEAN

---

**DDC: 320.014**

**Ikrar Nusa Bhakti, Diandra Mengko**

**INTELIJEN DALAM PUSARAN  
DEMOKRASI DI INDONESIA PASCA  
ORDE BARU**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 13 No. 1, Juni 2016, Hal. 69-82**

Intelijen merupakan topik kajian yang penting sekaligus rumit untuk dipahami karena sifat kerahasiaannya. Meski demikian, negara demokrasi selalu mendukung masyarakatnya untuk memiliki, setidaknya, pemahaman dasar terkait seluruh instansi pemerintah, termasuk intelijen. Pada tahun 2015, Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) telah melakukan penelitian yang berjudul “Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru”. Penelitian ini bukan saja berisi mengenai teori intelijen, pergumulan intelijen dan demokrasi di beberapa negara yang mengalami perubahan politik dari sistem otoriter ke demokrasi dan sejarah singkat intelijen di Indonesia, melainkan juga memuat ulasan awal demokratisasi intelijen di Indonesia. Reformasi intelijen di Indonesia adalah suatu keniscayaan. Intelijen harus bekerja sesuai dengan sistem demokrasi yang kita anut. Paradigma lama intelijen Indonesia sudah pasti akan dan harus berubah, pengawasan terhadap intelijen pun suatu keniscayaan. Adalah suatu keniscayaan pula bahwa pengawasan terhadap intelijen bukan membuat kerja-kerja rahasia mereka menjadi terbatas atau terhambat, melainkan justru intelijen mendapatkan kepercayaan dan didukung oleh rakyat, sehingga meningkatkan legitimasi intelijen dan tentunya peningkatan anggaran intelijen.

**Kata Kunci :** Demokrasi, Intelijen, Indonesia, Politik, Pasca Orde-Baru

---

**DDC: 352.14**

**Awani Irewati**

**PROBLEMATIKA KERJA SAMA  
PERBATASAN SEPANJANG SUNGAI  
MEKONG ANTARA TIONGKOK DAN  
ASEAN BAGIAN UTARA**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 13 No. 1, Juni 2016, Hal. 83-104**

Selama berabad-abad, sungai Mekong telah menjadi pusat kehidupan orang enam negara riparian ini. Secara geografis, mengalir melalui negara-negara tersebut untuk sekitar 4.900 km. Ini menciptakan sebuah DAS 795.000 km<sup>2</sup>, didistribusikan antara Upper Mekong River Basin yang terbentuk oleh China (21 persen) dan Myanmar (3 persen), serta Lower Mekong River Basin, yang terdiri Laos (25 persen), Thailand ( 23 persen), Kamboja (20 persen), dan Viet Nam (8 persen) (FAO, 2011). Untuk memenuhi kebutuhan orang-orang mereka sendiri di atas Sungai Mekong dan sub regional yang, negara-negara riparian telah mengembangkan beberapa inisiatif kerjasama lintas batas di antara mereka. Greater Mekong Subregion (GMS), Mekong Ricer Komisi [MRC] dll adalah contoh dari kerjasama lintas batas. Selain itu, ada beberapa kerjasama lain yang mencakup seluruh atau sebagian dari sub regional Mekong tetapi tidak secara khusus fokus pada Mekong River, yaitu ASEAN-China Free Trade Area dan Komunitas ASEAN. Kondisi ini menciptakan kompleksitas hubungan antara kerjasama di sub regional Mekong. Analisis tulisan ini beberapa potensi/masalah yang ada yaitu kemungkinan bahwa mereka kerjasama tumpang tindih; perbedaan profil negara-negara ‘tampaknya membuat kepentingan yang berbeda di antara mereka dll Analisis tersebut didasarkan pada beberapa penelitian lapangan di beberapa tempat (Vietnam, Laos, Thailand) pada tahun 2015.

**Kata kunci:** kerjasama lintas batas, negara-negara ASEAN Utara, RUPS, MRC, Sungai Mekong, konektivitas.

---

**DDC: 352.14**

**Khanisa**

**STRATEGI PENINGKATAN  
PEMAHAMAN MASYARAKAT  
TENTANG MASYARAKAT EKONOMI  
ASEAN**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 13 No. 1, Juni 2016, Hal. 105-118**

ASEAN tengah merubah pendekatan institusinya dari top-to-bottom ke cara yang lebih memasyarakat. Penciptaan sebuah komunitas mendorong ASEAN untuk bersikap

lebih inklusif dalam implementasi program-programnya. Dalam mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN, kesadaran dan pemahaman publik adalah faktor kunci yang menentukan apakah pillar ini akan dapat direalisasikan dengan sukses. Mengingat popularitas dari ASEAN dan kerangka-kerangkanya tidak diketahui secara signifikan di Indonesia, survei dan policy paper yang kemudian diterbitkan bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN yang mulai di terapkan tahun lalu.

**Kata Kunci :** ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN, Indonesia, Survei Publik.

---

**DDC: 320.014**

**Nanto Sriyanto**

**NEOTRADISIONALISME DAN  
DISTOPIANISME: TINJAUAN ATAS  
TIGA BUKU ROBERT D. KAPLAN**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 13 No. 1, Juni 2016, Hal. 119-136**

Artikel ini bertujuan menganalisa tulisan Robert D. Kaplan terutama yang terungkap dalam tiga publikasinya yaitu *The Coming Anarchy: Shattering the Dreams of the Post Cold War* (New York: Vintage Books. 2000), *The Revenge of Geography: What the Map Tells Us About Coming Conflicts and the Battle Against Fate* (New York: Random House Publishing. 2013), dan *Asia's Cauldron: the South China Sea and the End of A Stable Pacific* (New York: Random House. 2014). Robert D. Kaplan dengan pendekatan geopolitik dan berlatar belakang sebagai wartawan yang mengalami langsung sejumlah perubahan penting pasca-Perang Dingin membawa pesan tentang negaran gagal yang mengancam stabilitas global, utamanya negara-negara maju (2000), kebangkitan pemikiran klasik geopolitik dalam dunia yang semakin padat dengan kekuatan yang terpolarisasi (2013), dan implikasinya terhadap kawasan Asia Timur sebagai kawasan yang rawan konflik. Dari ketiga publikasi Kaplan tersebut, penulis melihat pesan senada yang berwujud dalam bentuk bangkitnya pemikiran neotradisionalisme realis dalam hubungan internasional dan distopianisme. Di lain pihak, penulis juga melihat kekurangan dalam uraiannya yang populer dan menarik minat banyak pembaca dari kalangan luas, baik akademisi, aktivis LSM, bahkan pengambil keputusan, Kaplan terbilang tidak cukup mengupas

posisi teoritisnya dibandingkan teori yang ada yang menjadi diskursus akademik. Alih-alih memunculkan paparan yang holistik sebagaimana ia sebagai pengamat lapangan dan travel journalist menempatkan diri dalam setiap publikasinya, tulisan Kaplan harus dikritisi secara akademik karena tidak cukup utuh memberikan pandangan sebagaimana klaimnya yang banyak diungkap.

**Kata Kunci:** Robert D. Kaplan, geopolitik, realis neotradisionalisme, holistik, travel journalist

---

**DDC: 324.2598**

**David Putra Setyawan, Arwin Datumaya  
Wahyudi Sumari**

**INDONESIA DEFENSE DIPLOMACY  
IN ACHIEVING CYBERSECURITY  
THROUGH ASEAN REGIONAL FORUM  
ON CYBERSECURITY INITIATIVES**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 13 No. 1, June 2013, Page 1-20**

*The development of information technology in the international world impacts to the use of cyberspace which covers all aspects of national life. Faced to this condition, Indonesian government needs to understand the state of cyber security and build it so that able to address any kind of threat which comes through cyberspace. In addition to internal conditions, the scope of the external noteworthy to be considered due the nature of cyber threats are transnational, cross the line of sovereignty, and has been seen as a common threat by the countries of the world. ASEAN has become a forum for Indonesia's to achieve national interests in order to support national security in the cyber field. Through the ASEAN Regional Forum (ARF) on cybersecurity initiatives, defense diplomacy strategy directed to increasing mutual trust (confidence building measures) between states and reduce any potential threats that may result from the external sphere. Those efforts, resulted in an agreement in the form of point of contacts between states and a shared vision for continuous training of cybersecurity in the form of seminars and workshops to build the capacity of human resources. Strategies and efforts are analyzed through a qualitative approach and primary data were collected through interviews with 15 informants from various government*

*agencies. In addition, literature, journals, and related documents are also used as supporting data.*

**Key Words:** *ARF, confidence building measures, cybersecurity, defense diplomacy*

---

**DDC: 324.2598**

**Fathimah Fildzah Izzati**

**THE "MASS LAYOFFS":  
ELECTRONICS INDUSTRY VALUE  
CHAIN, AEC, AND CHALLENGES FOR  
LABOUR MOVEMENT IN INDONESIA**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 13 No. 1, June 2013, Page 21-32**

*"Mass layoffs" issue has been rising in labour's political discourse in Indonesia since early 2016, following the announcement of economic policy package to face the Asean Economic Community (AEC). However, the word "mass" constructed in the issue goes against the employment data and is more closely related to political interests related to production in the electronics industry. On the other hand, labour movement issue in the electronics sector is also emerging along with the increase of labour market flexibility in this free market era, including the context of AEC. This study discusses the relationship between the mass layoffs issue, the implementation of AEC, and the labour movement in Indonesia, as well as the value chain of the electronics industry on the global level. It aims to show the role of labour movement in facing an economic scheme like AEC especially in electronics industry using value chain theory analysis. By using qualitative approach and literature review, the study found*

that the labour movement in Indonesia has an excellent opportunity to build strength at the regional level by positioning themselves in the global value chain and flexible labour market regime.

**Keywords:** Mass layoffs, Value Chain, Electronics Industry, Labor Market Flexibility, AEC, Labour Movement.

---

**DDC: 320.014**

**Ahmad Rizky Mardhatillah Umar**

**SPACE TRANSFORMATION AND  
STAKEHOLDERS PARTICIPATION:  
UNDERSTANDING INVOLVEMENTS  
OF INDONESIAN CIVIL SOCIETY  
ORGANISATIONS AND SMALL AND  
MEDIUM ENTERPRISES IN POST-2003  
REGIONALISM IN ASEAN**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 13 No. 1, June 2013, Page 33-52**

This article aims to explain the participation of stakeholders in the making of ASEAN Community after the regional political-economic transformation in 2003. The establishment of ASEAN Community, which is based on three pillars (politics & security, economics, social and cultural) has led to a more complex interactions between actors in the region. Before 2003, ASEAN has been perceived only as an 'international organisation', which is centered around the 'member states' as the only influential actor in the region. Following the establishment of ASEAN Community as a new form of regionalism in 2003, this article argues that the newly-established regional community has opened up spaces for contestations between the state and other new actors in the region, most notably business actors (both big businesses and small-and-medium enterprises) and civil society organisations. Drawn upon the critical perspective, this article argues that emerging interactions between actors in the region has been enabled by the transformation of space structure in ASEAN, that opened up spaces for contestations between stakeholders in the newly-transformed regional organisation. It thus leads to the more complex understanding of regionalism in Southeast Asia. The arguments provided will also be assessed by two case studies on the regionalisation of Human

Rights NGOs and Small-and-Medium Enterprises in Indonesia.

**Keywords:** regionalism, participation, stakeholders, ASEAN community, southeast asia, non-government organisations, small-and-medium enterprises.

---

**DDC: 320.014**

**Sandy Nur Ikfal Raharjo**

**THE SOCIAL RESILIENCE OF  
INDONESIAN BORDER AREA  
RESIDENTS TOWARDS THE ASEAN  
ECONOMIC COMMUNITY:  
A STUDY IN ENTIKONG SUBDISTRICT,  
WEST KALIMANTAN**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 13 No. 1, June 2013, Page 53-68**

ASEAN Economic Community (AEC) was formally come into force at the end of 2015, and will be further transformed to be more inclusive by 2025. To deal with this issue, the residents of Entikong subdistrict at the Indonesia-Malaysia borderland should have a strong social resilience. This article explain the author's work on the social resilience assessment of the Entikong residents towards the AEC implementation. By using a modified Sustainable Livelihood Approach, the result shows that Entikong residents have four adequate social resilience assets, namely natural capital, social capital, financial capital, and political capital. Unfortunately, they are still weak on physical and human capitals. This work also shows that cross-border cooperation implementation gives positive effects to the residents. For recommendation, cross-border cooperation should be re-optimized and a special treatment of border trade in AEC should be arranged.

**Keywords:** Entikong, Social Resilience, Cross-border Cooperation, ASEAN Economic Community.

---

**DDC: 320.014**

**Ikrar Nusa Bhakti, Diandra Mengko**

***INTELLIGENCE AND  
DEMOCRATIZATION IN INDONESIA  
POST NEW-ORDER***

**Jurnal Penelitian Politik**

***Vol. 13 No. 1, June 2013, Page 69-82***

*Intelligence is an important and also complicated topic to study and understand because of its nature of secrecy. However, democracy always pushes the people to have at least basic comprehension of all government agencies, including the world of intelligence. Along with that spirit, Center for Political Studies, Indonesian Institute of Sciences (P2P-LIPI) was conducting research entitled "Intelligence and Democratization in Indonesia Post New-Order" in 2015. This research not only discuss about intelligence theories, but also intelligence experience in transitional democracy states, brief history of Indonesian intelligence, and initial review on democratization of intelligence in Indonesia. We argue that intelligence reform in Indonesia is a requisite. Intelligence should operate under democratic system and principles. Oversight mechanism would not weaken intelligence role -in contrast, it would enhance intelligence professionalism by gaining public support, legitimacy, and adequate budget.*

**Keywords:** *Democracy, Intelligence, Indonesia, Politics, Post New-Order*

---

**DDC: 352.14**

**Awani Irewati**

***PROBLEMATIC BORDER COOPERATION  
ALONG THE MEKONG RIVER BETWEEN  
CHINA AND ASEAN NORTHERN***

**Jurnal Penelitian Politik**

***Vol. 13 No. 1, June 2013, Page 83-104***

---

*For centuries, the Mekong river has become the center of six riparian countries's people life. Geographically, it flows through these countries for about 4,900 km. It created a 795,000 km<sup>2</sup> river basin, distributed between the Upper Mekong River Basin that is formed by China (21 percent) and Myanmar (3 percent), as well as the Lower Mekong River Basin, which comprised Laos (25 percent), Thailand (23 percent), Cambodia (20 percent), and Viet Nam (8 percent) (FAO, 2011). To fulfill their own people's needs over the Mekong River and its subregion, those riparian states have been developing some transboundary cooperation initiatives among them. Greater Mekong Subregion (GMS), Mekong Ricer Commission [MRC] etc. are examples of the transboundary cooperation. Besides, there are some other cooperations that cover the whole or part of the Mekong subregion but do not specifically focus on Mekong River; i.e. ASEAN-China Free Trade Area and ASEAN Community. This condition creates a complexity of relationships among the cooperations in the Mekong subregion. This paper analysis some potential/existing problems i.e. a possibility that those cooperations overlap; the differences in the countries' profile seem to create different interests among them etc. The analysis is based on some field research in some places [Vietnam, Laos, Thailand] in 2015.*

**Keywords:** *transboundary cooperation, Northern ASEAN countries, GMS, MRC, Mekong River, connectivity.*

---

**DDC: 352.14**

**Khanisa**

***STRATEGY TO INCREASE PUBLIC  
UNDERSTANDINGS ABOUT ASEAN  
ECONOMIC COMMUNITY***

**Jurnal Penelitian Politik**

***Vol. 13 No. 1, June 2013, Page 105-118***

*ASEAN is gradually changing their approach from top-to-bottom to a more grassroots style institution. The idea of creating a community push ASEAN to be more inclusive in implementing its programmes. In realizing ASEAN Economic Community, public awareness and undertsndings is the key factor in whether the implementation of this ASEAN's pillar will succeed. Recalling that the popularity of*

*ASEAN and its frameworks are not significantly known in Indonesia, the survey and the policy paper that followed aim to find out the level of public understandings about ASEAN Economic Community which started to be implemented last year.*

**Keywords:** ASEAN, ASEAN Economic Community, Indonesia, public survey.

---

**DDC: 320.014**

**Nanto Sriyanto**

**NEOTRADISIONALISME DAN  
DISTOPIANISME: REVIEW FOR THREE  
BOOKS OF ROBERT D. KAPLAN**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 13 No. 1, June 2013, Page 119-136**

*This article is to analyze three publications of Robert D. Kaplan, which consist of *The Coming Anarchy: Shattering the Dreams of the Post Cold War* (New York: Vintage Books. 2000), *The Revenge of Geography: What the Map Tells Us About Coming Conflicts and the Battle Against Fate* (New York: Random House Publishing. 2013), and *Asia's Cauldron: the South China Sea and the End of A Stable Pacific* (New York: Random House. 2014). In those three publications, Kaplan utilizes geopolitical approach and embedded journalism in examining turbulent world in post-Cold War era. His arguments contain in the three books could be summarized as follows: failed states has threatened the stability the world, especially the prosperous developed countries (2000), resurgent of classical geopolitical thinking on tackling shrinking space yet polarized world politics (2013), implication on East Asia region as the volatile zone prone to conflict in the future. Based on the three publications, it could be seen that Kaplan is a proponent of neotraditional realism in IR studies, and it brings about dystopian thesis in those publications. Nevertheless it is discernible to note that despite his prosaic nature in almost of his writings that has attracted wider readership spread from academics, NGO's activists, and decision*

*maker, Kaplan has not given enough space to discuss his theoretical position before he comes up with single theoretical perspective. Therefore, instead of giving a holistic picture about his subject in those three publications, his arguments and thesis which he claims based on embedded journalism and field observation should be criticised due to imbalance description and short-sighted conclusion.*

*Key Words: Robert D. Kaplan, geopolitic, neotradisionalism realist, holistic, travel journalist*

**RESUME PENELITIAN  
INTELIJEN DALAM PUSARAN DEMOKRASI DI INDONESIA  
PASCA ORDE BARU**

**RESEARCH SUMMARY  
INTELLIGENCE AND DEMOCRATIZATION IN INDONESIA  
POST NEW-ORDER**

**Diandra Megaputri Mengko, Ikrar Nusa Bhakti, Indria Samego, Sri Yanuarti,  
Sarah Nuraini Siregar, Muhamad Haripin**

Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  
Jalan Jenderal Gatot Subroto No.10, Jakarta  
*e-mail: diandramengko@gmail.com*

Diterima: 10 Mei 2016; direvisi: 10 Juni 2016; disetujui: 8 Juli 2016

**Abstract**

*Intelligence is a challenging topic to discuss due to its secrecy nature. Nevertheless, democracy has always supported the community to have, at least, basic understanding of all government agencies, including intelligence. In 2015, Center for Political Studies, Indonesian Institute of Sciences (P2P-LIPI) has conducted a research titled "Intelligence and Democratization in Indonesia Post New-Order". This research not only discuss about intelligence theories, but also intelligence experience in transitional democracy states, brief history of Indonesian intelligence, and initial review on democratization of Indonesian intelligence. We argue that intelligence reform in Indonesia is a requisite. Intelligence should operate under democratic system and principles. The old paradigm of intelligence in Indonesia certainly will and must change, and oversight towards intelligence is necessity. Oversight mechanism would not weaken intelligence role, but rather it would enhance intelligence professionalism by gaining public support, legitimacy, and adequate budget.*

**Keywords:** *Democracy, Intelligence, Indonesia, Politics, Post New-Order*

**Abstrak**

Intelijen merupakan topik kajian yang penting sekaligus rumit untuk dipahami karena sifat kerahasiaannya. Meski demikian, negara demokrasi selalu mendukung masyarakatnya untuk memiliki, setidaknya, pemahaman dasar terkait seluruh instansi pemerintah, termasuk intelijen. Pada tahun 2015, Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) telah melakukan penelitian yang berjudul "Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru". Penelitian ini bukan saja berisi mengenai teori intelijen, pergumulan intelijen dan demokrasi di beberapa negara yang mengalami perubahan politik dari sistem otoriter ke demokrasi dan sejarah singkat intelijen di Indonesia, melainkan juga memuat ulasan awal demokratisasi intelijen di Indonesia. Reformasi intelijen di Indonesia adalah suatu keniscayaan. Intelijen harus bekerja sesuai dengan sistem demokrasi yang kita anut. Paradigma lama intelijen Indonesia sudah pasti akan dan harus berubah, pengawasan terhadap intelijen pun suatu keniscayaan. Adalah suatu keniscayaan pula bahwa pengawasan terhadap intelijen bukan membuat kerja-kerja rahasia mereka menjadi terbatas atau terhambat, melainkan justru intelijen mendapatkan kepercayaan dan didukung oleh rakyat, sehingga meningkatkan legitimasi intelijen dan tentunya peningkatan anggaran intelijen.

**Kata Kunci :** Demokrasi, Intelijen, Indonesia, Politik, Pasca Orde-Baru

**Pendahuluan**

Sejak berakhirnya Perang Dingin, di mana ancaman non-tradisional lebih mengemuka ketimbang ancaman militer/tradisional, informasi

intelijen menjadi lebih penting ketimbang persenjataan. Penting dipahami bahwa informasi intelijen adalah hasil antara. Hasil akhirnya adalah kebijakan. Suatu kebijakan akan semakin

baik dan tepat, apabila mendapatkan masukan informasi intelijen yang baik pula—cepat dan tepat (*velox et exactus*).

Informasi intelijen dapat dikatakan baik dan maksimal apabila proses penggalian informasinya berlangsung secara apik dengan informasi yang amat berharga, diolah kembali oleh analis intelijen yang amat ahli dan berpengalaman, diubah menjadi rekomendasi kebijakan yang amat singkat dan akurat, kemudian dijalankan oleh pengambil kebijakan secara tepat waktu dan tepat sasaran.

Pengguna ataupun pengambil keputusan membutuhkan kualitas analisis intelijen yang baik, agar ia dapat membuat keputusan yang tepat, mempersiapkan kapabilitas dan sumberdaya nasional untuk menghadapi ancaman-ancaman tradisional dan non-tradisional. Antara badan atau institusi intelijen dan *client*-nya (pengguna atau *users*) harus ada konvergensi kepentingan strategik. Di satu sisi badan intelijen tahu kepentingan *client*-nya, sebaliknya sang *client* juga harus tahu apa yang dibutuhkan oleh badan intelijen agar dapat menghasilkan produk intelijen yang bermutu.<sup>1</sup>

Satu hal penting yang harus dikemukakan, intelijen antara lain dibutuhkan untuk mencegah tindak kekerasan atau teror yang dimotivasi politik, agama atau apa pun, agar nyawa manusia dan harta benda masyarakat dapat terlindungi. Intelijen juga dibutuhkan untuk mencegah terjadinya dadakan strategik terhadap keamanan nasional yang dilakukan oleh aktor-aktor domestik yang ingin menjatuhkan pemerintahan dengan cara-cara tidak demokratis atau ingin mengubah sistem politik dengan cara-cara kekerasan; aktor-aktor domestik yang menjadi boneka dari kepentingan asing; aktor-aktor domestik yang memiliki kepentingan yang sama dengan aktor-aktor asing tetapi keduanya bukan bagian dari satu organisasi transnasional; atau aktor-aktor internasional yang ingin mengacaukan kondisi sosial, ekonomi, politik dan keamanan nasional.

---

<sup>1</sup> Kevin Rogers, "Counter-Terrorism and the Protective Services Coordination Center" dalam Anthony Bergin and Robert Hall (eds.) *Intelligence and Australian National Security*, Canberra: Australian Defence Studies Centre, Australian Defence Force Academy, 1994, hlm. 89-94.

Kata kunci penting yang dikemukakan di sini ialah, jangan sampai tujuan untuk melindungi kepentingan nasional dilakukan dengan cara-cara yang justru meniadakan kebebasan masyarakat itu sendiri. Tujuan tidaklah menghalalkan cara. Sudah tentu para pengguna informasi intelijen harus mendefinisikan secara jelas apa tugas-tugas intelijen, kualitas informasi yang diinginkan, prioritas tugas yang harus diemban badan-badan intelijen, dan alokasi sumber daya yang diberikan kepada badan itu untuk menjalankan tugas-tugasnya.

Praktik intelijen Indonesia pada era Orde Baru kerap dikenal sebagai 'intelijen hitam'—dimana intelijen beroperasi untuk mengatasi ancaman terhadap rezim penguasa. Tak heran pada masa itu kerap terjadi praktik penyimpangan intelijen seperti yang terjadi pada operasi militer di Aceh, Timor-Timur, Papua, Peristiwa Malapetaka 15 Januari 1974 (Malari), peristiwa Tanjung Priok 1984, kasus Talangsari di Lampung, kasus penembakan misterius (petrus) di era 1980-an, dan terakhir adalah kasus penghilangan aktivis sepanjang tahun 1997-1998. Pada periode ini badan-badan intelijen mengalami politisasi dan militerisasi sehingga dapat melakukan intervensi politik secara efektif dan sistematis ke dalam setiap lini kehidupan masyarakat.<sup>2</sup> Namun, tidak semua aktivitas intelijen tersebut terkait dengan kepentingan rezim, melainkan ada juga yang merupakan bagian dari pertarungan kekuasaan atau pun konflik di internal institusi intelijen sendiri. Kasus Malari 1974 adalah contoh peristiwa yang timbul dari persaingan petinggi-petinggi intelijen untuk mendapatkan impresi penguasa Orde Baru dengan menjadikan organisasi dan gerakan mahasiswa sebagai obyek intelijen.

Seiring dengan runtuhnya kekuasaan Rezim Orde Baru pada tahun 21 Mei 1998, terjadi perubahan politik di Indonesia. Dengan dicanangkannya sistem demokrasi sebagai praksis politik kontemporer di Indonesia, hal ini semestinya diikuti dengan adanya perubahan di dalam lembaga-lembaga negara termasuk di dalamnya badan intelijen. Salah satu

---

<sup>2</sup> Andi Widjajanto dan Artanti Wardhani, *Hubungan Intelijen-Negara 1945-2004*, Jakarta: Pacivis Universitas Indonesia dan Friedrich Ebert Stiftung, 2008, hlm.4-7.

aspirasi yang terpenting adalah mengembalikan paradigma, peran, fungsi, budaya dan struktur lembaga-lembaga intelijen sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis dan tata-kelola pemerintahan yang baik.<sup>3</sup> Jika dulu aparat intelijen bukan saja membuat produk intelijen melainkan juga menjadi aparat penindak terkait dengan kepentingan rezim penguasa, maka kini intelijen hanya bertindak sebagai pemberi analisis dan pertimbangan kebijakan kepada presiden dan/atau pejabat tinggi sebagai pengguna informasi intelijen.

Meskipun demikian, akselerasi reformasi intelijen di Indonesia tidak berjalan beriringan dengan reformasi aktor-aktor di sektor keamanan lainnya (militer dan kepolisian). Dari aspek legislasi, Undang-undang Polri, Undang-Undang Pertahanan Negara, dan Undang-Undang TNI telah lama disahkan sebelum UU Intelijen Negara, walau proses pembahasannya berlangsung hampir bersamaan yakni pada awal 2000-an. Meski kertas kerja, rancangan undang-undang, dan diskusi tentang regulasi intelijen telah berlangsung sejak akhir 2004, proses legislasi baru selesai pada 2011 dengan diundangkannya UU No. 17/2011 tentang Intelijen Negara.<sup>4</sup>

Keterlambatan reformasi intelijen tersebut, terjadi terutama karena fokus kritik para proponent reformasi adalah militer dan kepolisian yang saat itu masih bernaung dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). ABRI dinilai sebagai salah satu pilar utama penopang kekuasaan Orde Baru. Intelijen tidak disebut secara tersendiri karena fungsi, wewenang, dan posisi politiknya dipandang sebagai bagian dari ABRI.<sup>5</sup> Ditambah lagi dengan pandangan yang berkembang saat itu bahwa pemisahan TNI dan Polri, beserta reformasi internal dua institusi tersebut, akan menimbulkan ‘efek bola salju’

bagi intelijen, suatu kalkulasi yang belakangan diketahui keliru.

Pada tataran praksis, ternyata masih ditemukan beberapa praktik penyimpangan pada masa reformasi seperti pada kasus pembunuhan aktivis HAM Munir pada September 2004 serta kasus percetakan uang palsu dan cukai palsu yang melibatkan aparat BIN.<sup>6</sup> Tak jelas apakah penyebab praktik penyimpangan ini adalah kekosongan regulasi pada saat itu, ataukah adanya faktor deliberasi politik yang terbentuk pada masa itu. Hal inilah yang kemudian menempatkan kajian pengaruh perkembangan politik dalam proses reformasi intelijen di Indonesia pasca Orde Baru sangat penting dan menarik untuk dibahas.

Pada dasarnya, studi tentang intelijen di Indonesia pasca Orde Baru telah banyak dilakukan. Beberapa publikasi yang dapat disebutkan adalah seri kajian intelijen yang dari Kelompok Kerja Simpul Aliansi Nasional untuk Demokratisasi Intelijen (SANDI), yang dikoordinasi Pacivis Universitas Indonesia. Selain itu, terdapat pula mantan pejabat Badan Intelijen Negara, sarjana, peneliti, serta wartawan yang menulis intelijen.<sup>7</sup>

Berbagai studi intelijen tersebut dapat dibagi dalam dua pola. *Pertama*, deskripsi historis atas perkembangan intelijen di Indonesia, yang meliputi periode kolonial hingga pembahasan kritis atas kekuasaan besar dan penyalahgunaan

<sup>6</sup> Imparsial, *Evaluasi Kinerja BIN di masa transisi dan catatan untuk Reformasi*, Jakarta: Imparsial, 2005, hlm.1, 21-22.

<sup>7</sup> Beberapa riset intelijen Indonesia yang ditulis peneliti dalam negeri maupun luar negeri, di antaranya adalah Allan Akbar, *Memata-matai Kaum Pergerakan: Dinas Intelijen Politik Hindia Belanda, 1916-1934* (Tangerang: Marjin Kiri, 2013); AM Hendropriyono, *Filsafat Intelijen Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2013); Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, *Komunikasi dalam Kinerja Intelijen Keamanan* (Jakarta: Gramedia, 2013); G. Ambar Wulan, *Polisi dan Politik: Intelijen Kepolisian pada Masa Revolusi Tahun 1945-1949* (Jakarta: Rajawali Press, 2009); Beni Sukadis (ed.), *Almanak Reformasi Sektor Keamanan 2009* (Jakarta: Lesperssi, 2009); Beni Sukadis (ed.), *Almanak Reformasi Sektor Keamanan 2007* (Jakarta: Lesperssi, 2007); P. Sulistiyanto, “The politics of intelligence reform in post-Suharto Indonesia,” *The Journal of Australian Institute of Professional Intelligence Officers*, 15 (2), 2007, hlm. 29-46; Ken Conboy, *INTEL: Inside Indonesia's Intelligence Service* (Jakarta: Equinox, 2004); Richard Tanter, *Intelligence Agencies and Third World Militarization: A Case Study of Indonesia, 1966-1989, with Special Reference to South Korea, 1961-1989*, Disertasi di Universitas Monash, 1991, tidak dipublikasikan.

<sup>3</sup> Lihat, antara lain, Andi Widjajanto, ed., *Reformasi Intelijen Negara*, Jakarta: Pacivis Universitas Indonesia dan Friedrich Ebert Stiftung, November 2005.

<sup>4</sup> UU Polri dan UU Pertahanan Negara disahkan tahun 2002, UU TNI pada tahun 2004, sedangkan UU Intelijen Negara baru disahkan tahun 2011.

<sup>5</sup> Deskripsi umum atas besarnya kekuasaan ABRI pada era Orde Baru, lihat Abdoel Fattah, *Demiliterisasi Tentara. Pasang Surut Politik Militer 1945-2004*, Yogyakarta: LKiS, 2005, hlm. 152-166.

kekuasaan yang dimiliki lembaga intelijen pada era Orde Baru hingga menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. *Kedua*, studi normatif mengenai tata kelola institusi intelijen dalam sistem politik demokrasi. Pada pola kedua ini, para penulis tersebut memberikan koreksi atas kebijakan dan praktek intelijen di Indonesia era Orde Baru, serta solusi agar keadaan serupa tidak terulang di masa depan (panduan atas praktik terbaik).

Terlepas dari fakta bahwa berbagai publikasi tersebut telah memberikan kontribusi berharga bagi dunia akademik, terdapat juga kekurangan dan kelemahan yang terlihat secara nyata dalam kajian atas intelijen Indonesia selama ini. *Pertama*, poin kelemahan yang kentara adalah ketidakjelasan dan tumpang-tindihnya pengertian intelijen dalam berbagai kajian tersebut. Sebagai konsekuensinya, alih-alih memberi penerangan kepada publik tentang apa itu intelijen, berbagai kajian tersebut malah memperkuat kesan bahwa intelijen, sebagai praktik maupun studi, merupakan ‘dunia yang tak terlihat’, rahasia, dan eksklusif. *Kedua*, minim sekali pembahasan atas pengaruh momentum reformasi pada perkembangan intelijen di Indonesia. Dengan kata lain, berbagai kajian tersebut cenderung menempatkan reformasi sebagai tiang pancang peristiwa politik dan perubahan (jika ada) dalam intelijen di Indonesia adalah sebagai *dampak* atau *keluaran*: reformasi (usaha demokratisasi) dan intelijen tidak dilihat sebagai proses yang berjalan simultan dan ada hubungan timbal-balik. Namun demikian, penelitian ini tetap akan berkorespondensi dengan berbagai literatur tersebut, baik untuk penyajian data maupun memberikan konteks bagi sanggahan atau kritik yang akan disampaikan penelitian ini.

Atas dasar itu, penelitian ini berupaya untuk mengisi kelemahan pada kajian intelijen selama ini, yaitu dengan melihat persoalan intelijen dari perspektif ilmu politik. Hal ini penting untuk dilakukan karena Indonesia mengalami suatu perubahan dalam sistem politik dari otoriter ke sistem demokrasi.

Penelitian ini merupakan penelitian pertama dari rangkaian penelitian yang akan dilakukan 5 (lima) tahun ke depan, dengan pembabakan sebagai berikut: Intelijen dalam

Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru (2015); Intelijen dan Politik Era Soekarno (2016); Intelijen dan Keamanan Nasional era Soeharto (2017); Intelijen dan Keamanan Nasional pasca Orde Baru (2018); dan Intelijen, Negara dan Masyarakat: Kesenambungan dan Perubahan (2019). Seluruh rangkaian penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman *state of the art* dari intelijen di Indonesia, sekaligus sebagai upaya melengkapi dan memutakhirkan kajian intelijen di Indonesia melalui pembahasan perkembangan intelijen secara khusus dari satu periode ke periode lainnya.

### **Metodelogi Penelitian**

Penelitian “Intelijen Dalam Pusaran Demokrasi Di Indonesia Pasca Orde Baru” dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan metode analisis data secara deskriptif dan analitis. Metode pengumpulan data dilakukan melalui: 1) penelitian lapangan; 2) pengumpulan literatur primer serta sekunder; 3) *focus group discussion* (FGD).

Penelitian lapangan dilakukan melalui teknik wawancara mendalam yang dipandu oleh sebuah pedoman wawancara. Wawancara dilakukan terhadap beberapa narasumber penting, seperti: aparat intelijen, mantan aparat intelijen, anggota DPR, jurnalis yang memiliki perhatian terhadap isu intelijen, dan aktivis organisasi non-pemerintah.

Data sekunder juga dikumpulkan dari berbagai pihak untuk mengimbangi informasi baik dari berbagai dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga intelijen maupun dari luar lembaga intelijen (triangulasi data). Temuan penelitian lapangan yang dihasilkan, baik berupa data primer maupun sekunder akan diolah untuk menghasilkan laporan penelitian yang komprehensif sesuai dengan panduan penelitian yang telah disusun dalam desain riset. Untuk menambah data dan memperkuat analisis, tim juga melakukan FGD di Jakarta dengan beberapa narasumber yang memiliki kompetensi pada penelitian ini.

### **Pembahasan**

Pada dasarnya, kebutuhan akan kondisi aman yang terbebas dari bahaya/ancaman merupakan alasan utama mengapa keberadaan intelijen penting.<sup>8</sup> Apabila dijabarkan lebih jauh, terdapat tiga alasan utama mengapa badan intelijen diperlukan bagi setiap negara. Pertama, untuk menghindari terjadinya *strategic surprise* (pendadakan strategis). Setiap badan intelijen selalu dituntut untuk mampu mendeteksi segala ancaman, kekuatan, peristiwa maupun perkembangan yang berpotensi membahayakan eksistensi bangsa dan negara. Kedua, untuk mendukung proses kebijakan. Para pembuat kebijakan secara konstan membutuhkan laporan yang tepat dan akurat mengenai latar belakang, konteks, informasi, peringatan, penilaian resiko, keuntungan, hingga perkiraan hasil yang akan terjadi. Ketiga adalah untuk menjaga kerahasiaan informasi, kebutuhan maupun metode. Disaat pemerintahan suatu negara menyimpan informasi penting yang dirahasiakan, maka cara untuk mendapatkan atau melindungi informasi tersebut pun juga perlu bersifat rahasia.<sup>9</sup>

Namun bagi negara demokrasi, sulit dipungkiri bahwa karakteristik kerahasiaan yang sangat kental di dunia intelijen dapat menjadi sumber kekhawatiran ataupun ketidaknyamanan publik. Kekhawatiran bahwa sifat kerahasiaan yang dimiliki intelijen berpotensi untuk mengancam keamanan warga negara, tatanan negara, bahkan proses demokrasi suatu negara merupakan salah satu alasannya.<sup>10</sup> Oleh karena itu, tantangan bagi negara-negara demokrasi adalah membangun sebuah peraturan yang komprehensif, perlindungan hak asasi manusia, mencegah penyalahgunaan kewenangan intelijen dan memastikan bahwa intelijen bekerja di bawah peraturan dan sistem yang sah dan demokratis. Upaya untuk menempatkan intelijen dalam konteks demokrasi inilah yang kemudian dikenal dengan istilah demokratisasi intelijen.

Secara konseptual, proses demokratisasi intelijen dari negara otoriter ke negara demokratis

ditentukan oleh beberapa faktor seperti sejarah awal institusi intelijen yang kebanyakan berasal dari institusi militer, budaya nasional dan persepsi pimpinan nasional mengenai keamanan nasional dan ancaman atasnya, proses demokratisasi di negara tersebut, dan globalisasi. Demokratisasi politik dan demokratisasi intelijen adalah proses yang evolusioner, karena itu membutuhkan konsistensi dan kesinambungan dalam proses perubahannya.

Pada rejim otoriter terdapat tiga tipe ideal dalam soal interaksi Intelijen-Negara yaitu (1) Intelijen Politik untuk menghadapi ancaman internal, (2) Militerisasi Intelijen untuk menghadapi ancaman eksternal dan (3) Negara Intelijen dalam menghadapi ancaman internal dan eksternal yang mengancam keberadaan negara dan mengguncang rejim. Pada rezim demokratis tiga tipe tersebut berubah menjadi Intelijen Keamanan untuk mengatasi ancaman internal, Intelijen Strategis untuk ancaman eksternal dan Diferensiasi Intelijen untuk menghadapi ancaman internal dan eksternal.<sup>11</sup>

Di Indonesia, badan-badan intelijen telah berdiri sejak kemerdekaan. Seiring dengan perubahan sistem politik dari otoriter ke demokrasi, saat ini hanya terdapat beberapa badan intelijen saja yang masih eksis (Lihat Gambar 1).<sup>12</sup>

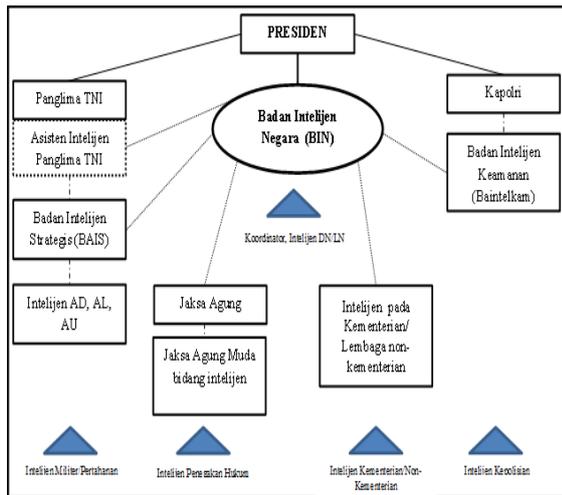
<sup>8</sup> Giovanni Manunta, *A Security Problem*, *Defining Security Journal*, 2000, hlm.10-14

<sup>9</sup> Mark M. Lowenthal, *Intelligence: From Secret to Policy*, Washington: CQ Press, 2009, hlm.2-5

<sup>10</sup> Ministerial Review Commission On Intelligence Republic of Africa, *op.cit.*

<sup>11</sup> Andi Widjajanto dan Artanti Wardhani, *op.cit.*, hlm. 19.

<sup>12</sup> Badan-badan intelijen tersebut diwajibkan untuk berkoordinasi dengan Badan Intelijen Negara (BIN) yang bertugas sebagai koordinator untuk mengumpulkan dan memilah informasi untuk dilaporkan kepada Presiden (*end-user*). Selain itu, BIN juga memiliki fungsi operasional untuk melakukan kegiatan intelijen dalam dan luar negeri.

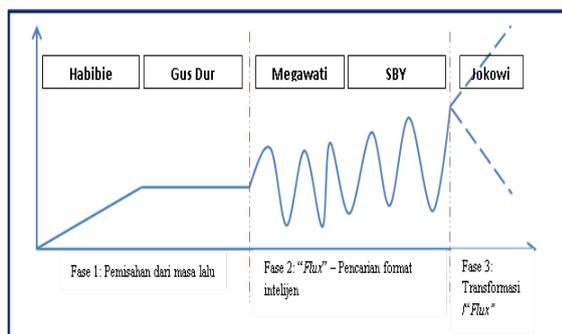


Sumber: Diolah dari berbagai sumber

**Gambar 1.** Badan Intelijen di Indonesia

Dari gambar tersebut, terlihat bahwa telah terjadi diferensiasi peran badan-badan intelijen di Indonesia. Meski demikian, dalam praktik masih terdapat tumpang tindih peran yang dilakukan oleh badan-badan intelijen yang kerap mengakibatkan kerja-kerja intelijen menjadi tidak efektif dalam menghadapi dadakan-dadakan yang terjadi. Hal ini menegaskan bahwa restrukturisasi organisasi saja ternyata belum cukup untuk mendorong kerja-kerja intelijen yang efektif dan menempatkan intelijen dalam kerangka yang demokratis.

Dipandang dari sudut upaya demokratisasi intelijen, penelitian ini menemukan bahwa pola reformasi intelijen Indonesia dipengaruhi oleh tarik menarik kepentingan politik antara pemerintah (*user* dan lembaga pengawas), badan-badan intelijen dan masyarakat. (Lihat Gambar 2.)



**Gambar 2.** Pola Reformasi Intelijen

Masa pemerintahan Habibie dan Gus Dur dapat dikategorikan sebagai “fase pemisahan dari masa lalu”. Meskipun belum terbentuk kebijakan-kebijakan yang mendukung tata kelola intelijen dalam sistem demokrasi maupun efektifitas kinerja intelijen, namun banyak kebijakan masa lalu yang menjadi fondasi dasar penyalahgunaan intelijen dihapus pada masa pemerintahan Habibie. Upaya untuk memutus ikatan masa lalu juga sebetulnya dilakukan pada masa pemerintahan Gus Dur dengan wacana pembentukan LIN, meskipun gagal karena mendapatkan resistensi dari militer.

Masa pemerintahan Megawati dan SBY dapat dikategorikan pada “fase *flux*” –suatu pencarian format intelijen. Pada fase kedua ini, terdapat berbagai macam fluktuasi yang dialami oleh intelijen. Capaian terbaik dalam hal tata kelola intelijen, dicapai pada era ini melalui pembentukan UU Intelijen No.17/2011 sebagai dasar hukum kerja intelijen; penataan organisasi sesuai dengan dinamika ancaman kekinian (penambahan deputi di BIN); legitimasi BIN sebagai koordinator; keberadaan mekanisme koorbadani; keberadaan mekanisme pengawasan eksternal (DPR); dan dihapuskannya kewenangan menangkap.

Sayangnya, berbagai perubahan ini seolah menjadi kosmetik belaka. Pola politisasi intelijen yang masih berulang, kemampuan analisa yang masih rendah dalam mengidentifikasi kondisi keamanan (kasus terorisme hingga penyadapan), rivalitas antar badan intelijen (BIN, BAIS dan Baintelkam), dominasi militer pada bidang intelijen, pandangan ancaman yang masih didominasi oleh ancaman dalam negeri (warga negara)<sup>13</sup>, hingga kasus penyimpangan intelijen seperti Kasus Munir (2004) dan pencetakan uang palsu (2005) sesungguhnya menunjukkan masih banyak stagnansi di tengah arus perubahan yang terjadi.<sup>14</sup>

Dari hasil analisis fase I ataupun II, ditemukan bahwa segala bentuk perubahan positif dapat terjadi apabila terdapat tiga faktor

<sup>13</sup> Hasil wawancara mendalam dengan narasumber, Jakarta: Oktober 2015.

<sup>14</sup> Hasil pengumpulan data pada *Diskusi Terbatas* “Intelijen Dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia,” Jakarta: 15 Oktober 2015.

yang terpenuhi: pandangan *end-user* yang reformis, keberadaan tekanan publik, dan adanya dorongan internal (baik dari pimpinan maupun personil intelijen secara umum). Sayangnya ketiga faktor ini sama sekali tidak terpenuhi -paling tidak dalam satu tahun pemerintahan Jokowi. Hal ini terlihat dari nuansa politik pemilihan KaBIN, kecenderungan masyarakat yang menganggap reformasi intelijen telah selesai, tuntutan untuk memiliki kewenangan menangkap (tidak ada dorongan internal untuk menjadi lebih reformis). Di sisi lain, berbagai faktor penghambat reformasi intelijen pun tidak kunjung berubah ataupun hilang. Dominasi militer pada bidang intelijen, pertimbangan politis terkait dukungan politik militer, kepentingan politik *end-user*, intelijen yang bias politik hingga kemampuan analisis intelijen yang masih rendah menunjukkan bahwa reformasi intelijen akan cenderung berjalan stagnan ataupun melemah. Sehingga perkembangan demokratisasi intelijen pada era Jokowi kemungkinan masih akan berada pada tahap *flux*.

Selain belum maksimalnya upaya demokratisasi intelijen di Indonesia, penelitian ini juga menemukan bahwa profesionalisme intelijen Indonesia pada masa reformasi masih belum terbentuk. Pada dasarnya profesionalitas intelijen dapat ditinjau dari fungsi intelijen yang telah terkelola dan berjalan dengan baik. Fungsi ini terkait dengan cara kerja intelijen dalam menggali informasi—sebagai entitas yang bekerja dari mulai menyediakan, mengumpulkan, dan menganalisis data.<sup>15</sup> Dengan kata lain, intelijen bekerja sebagai kolektor (mengumpulkan) data secara bijaksana, dapat melakukan analisis, tanggap dan terampil. Semuanya ini bekerja secara terintegrasi sehingga daya prediksi dapat dikeluarkan untuk merumuskan sebuah dasar kebijakan (*basis policy*) yang dikeluarkan oleh Presiden.<sup>16</sup> Karena itulah intelijen sebenarnya juga merupakan tenaga ahli pemerintah dalam hal metode pengumpulan dan eksploitasi data dan informasi, tetapi dalam tingkatan tertentu

berfungsi sebagai ahli tentang masalah-masalah tertentu.<sup>17</sup>

Cara kerja intelijen dalam mendapatkan informasi tentu tidak terjadi begitu saja. Cara kerja ini digelar secara memadai dan mengikuti apa yang disebut dengan siklus intelijen (*intelligence cycle*). Hal ini merupakan bagian dari proses intelijen dalam menjalankan fungsi mereka. Siklus intelijen dapat dijelaskan dengan mengacu pada konsep yang biasanya terdiri dari lima tahap. Pertama, perencanaan dan pengarahan; kedua, pengumpulan; ketiga, pengolahan; keempat, analisis; kelima, diseminasi (penyebaran). Produk akhir dari siklus intelijen ini adalah rancangan penilaian yang kemudian diserahkan kepada *user*, yaitu Presiden. Rancangan inilah yang menjadi dasar bagi *user* dalam merumuskan suatu kebijakan atau perintah operasi.<sup>18</sup>

Secara sederhana, jika menggunakan pendekatan fungsi, maka intelijen memiliki tiga pengertian, yakni penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Sementara jika menggunakan pendekatan tugas, intelijen dapat diartikan sebagai upaya deteksi dini, peringatan dini, dan perkiraan.<sup>19</sup> Terdapat satu lagi fungsi yang melekat pada intelijen, yaitu Kontra Intelijen. Kontra intelijen adalah bagian integral dari keseluruhan proses intelijen yang dirancang guna memastikan informasi yang dikumpulkan adalah benar, melalui evaluasi yang berkelanjutan dari berbagai sumber dan informasi.

Secara sederhana, fungsi intelijen di Indonesia pasca Orba dapat dibagi ke dalam dua bagian. Bagian pertama pada periode 1999-2010 (Pra-2011), dan bagian kedua pada periode 2011-2015 (Pasca 2011). Pembagian ini didasarkan atas kemunculan UU No. 17 Tahun 2011, yang disahkan pada tanggal 7 November 2011. Kemunculan UU ini dapat dijadikan titik tolak dalam melihat fungsi intelijen pasca Orba, sebab setelah isu Reformasi Sektor Keamanan bergulir tahun 1998, tuntutan agar institusi keamanan menjadi profesional menguat. Dan

<sup>15</sup> Peter Gill & Mark Phythian, *Intelligence in an Insecure World*, (USA: Polity Press, 2006) hlm. 1.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>17</sup> Aleksius Jemadu (ed), *Praktik-Praktik Intelijen dan Pengawasan Demokratis-Pandangan Praktisi*, Jakarta: DCAF-FES SSR Volume 2, 2007, hlm. 15.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>19</sup> Supono Soegirman, *Intelijen: Profesi Unik Orang-orang Aneh*, Jakarta: Media Bangsa, Jakarta, 2001, hlm. 7.

tuntutan tersebut tentu memerlukan sebuah payung hukum yang dapat memberikan ruang gerak bagi institusi keamanan (TNI, Polri, dan BIN) agar dapat melakukan langkah-langkah reformasi internal.

Pada era era tahun 2011, terdapat dua kategori aspek maupun isu yang menjadi pijakan dalam menganalisis fungsi intelijen di Indonesia. *Pertama*; tuntutan agar fungsi intelijen yang dilakukan di lapangan—dalam menggali informasi kepada masyarakat-- tidak lagi bersifat represif. Secara empirik, dorongan agar tuntutan diatas (segera) direalisasikan dan melekat pada fungsi intelijen di masa ini tampaknya masih jauh dari harapan. Misalnya saja dari sisi regulasi, justru dimunculkan kembali Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) melalui Permendagri Nomor 11 Tahun 2006, yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Dibentuknya Kominda diprotes CSO karena membuka pintu pelanggaran HAM. Apalagi kemudian muncul Permendagri No. 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah. Kedua peraturan ini dinilai sebagai praktek intelijen masa Orba yang dilanjutkan kembali dan berpotensi melakukan pelanggaran HAM. Selain itu, adanya peraturan ini dianggap seperti perpanjangan negara untuk mengontrol masyarakatnya serta membuka peluang terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh intelijen di daerah dengan mengatasnamakan “demi kepentingan negara.”

*Kedua*; melihat fungsi intelijen dalam konteks ancaman terhadap keamanan nasional. Berdasarkan konteks keamanan nasional, periode tahun 1998-2010 atau hingga pertengahan tahun 2011, terdapat tiga kategori spektrum ancaman terhadap keamanan nasional dan menjadi wilayah tugas dari BIN. Spektrum ancaman tersebut adalah: kasus terorisme, konflik sosial, dan konflik separatisme.

Dalam kasus terorisme, fungsi intelijen yang krusial dan dibutuhkan adalah menggali informasi mengenai potensi-potensi terjadinya tindak terorisme, melakukan analisis dan kemudian melakukan upaya preventif melalui *sharing* informasi dengan penegak hukum, yaitu Polri. *Sharing* informasi ini bertujuan apabila diperlukan tindakan preventif yaitu dalam bentuk

penangkapan pihak yang kuat diduga (akan) melakukan tindak terorisme, maka Polri yang kemudian dapat melakukan eksekusi tersebut.

Sedangkan pada upaya preventif yang dapat dilakukan melalui fungsi intelijen adalah dengan konsep deradikalisasi. Namun program deradikalisasi membutuhkan kebijakan yang menyeluruh dan menjadi tugas banyak pihak. Namun selama ini, program deradikalisasi hanya menjadi otoritas dari BNPT.

Pada masalah konflik sosial, fungsi intelijen yang perlu diperhatikan ulang adalah bagaimana cara (individu) intelijen menggali informasi demi menjalankan fungsi pengamanan yang condong kepada upaya preventif. Artinya, pencarian dan analisis informasi intelijen ditujukan untuk melihat potensi konflik sosial yang dapat terjadi, kemudian merekomendasikan alternatif-alternatif tindakan kepada Presiden agar konflik tidak (dengan cepat) pecah. Fungsi analisis informasi ini pada dasarnya bersinggungan juga dengan adanya Kominda dan Permendagri. Semestinya kedua regulasi ini dapat menjadi *tools* dan *backup* intelijen dalam menjalankan fungsi pengamanan, serta mencegah meletusnya konflik sosial.

Jika merujuk pada fungsi intelijen, sebenarnya bisa saja dilakukan pengumpulan informasi demi mencegah potensi-potensi terjadinya konflik sosial. Data maupun informasi yang dapat dikumpulkan oleh intelijen antara lain: pertama, peta demografi penduduk, baik dari segi usia, pendidikan, agama, suku dsb.; kedua, potensi sumber daya alam; ketiga, potensi sumber daya manusia; keempat, konsumsi bulanan penduduk setempat; kelima, peta konflik dalam masyarakat, berikut sumber, akar masalah, potensi konflik, dan kemungkinan penyulutnya; keenam, peta pemukiman penduduk, dan sebagainya.<sup>20</sup> Pengumpulan dan analisis informasi ini amat berguna untuk mengelola konflik jika terjadi dalam masyarakat. Penyelesaian atas persoalan yang ada di dalam masyarakat juga dapat dilakukan secara cepat atas dasar data intelijen ini.

<sup>20</sup> Ikrar Nusa Bhakti & Sarah Nuraini Siregar, “Alternatif Model Pengelolaan Keamanan di Daerah Konflik”, dalam Sarah Nuraini Siregar (editor), *Alternatif Model Pengelolaan Keamanan di Daerah Konflik*, P2P LIPI, Jakarta, 2009, hlm. 140.

Data maupun informasi yang telah terkumpul dapat dianalisis untuk melihat kemungkinan potensi konflik sosial. Di dalam BIN sebenarnya sudah ada Dewan Analisis Strategis (DAS) yang sekarang berubah menjadi DISK (Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan).

Pada masalah konflik separatisme; fungsi intelijen yang dijalankan sebenarnya juga hampir sama dengan konflik sosial. Namun, hal yang perlu digarisbawahi dalam melihat fungsi intelijen adalah *apakah* informasi maupun data yang dikumpulkan berkontribusi terhadap efektivitas pola penanganan konflik tersebut. Salah satu indikator dari efektivitas tersebut dengan menyoroti *bagaimana* keterpaduan penanganan konflik separatisme antara aktor-aktor keamanan. Idealnya, tahap pertama dimulai dari analisis data dan informasi intelijen dalam memetakan potensi konflik. Dari data ini sebetulnya bisa dilihat tren dinamika dalam masyarakat sehingga analisis yang dihasilkan dapat berupa dua input (masukan). Pertama adalah analisis untuk upaya preventif. Analisis ini sifatnya jangka panjang dan pemerintah yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan kebijakan tersebut demi upaya pencegahan agar konflik separatis tidak meluas.

Pada era pasca tahun 2011, analisis fungsi intelijen bertitik tolak dari disahkannya UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Saat digulirkannya UU ini, pada dasarnya tugas, fungsi, dan peran intelijen di Indonesia tidak ada perubahan. Sebab bagaimanapun juga, mekanisme dan prosedur penyelenggaraan intelijen bersifat universal yang didasarkan atas kerangka demokrasi.<sup>21</sup> Hal yang berubah adalah bagaimana menempatkan tugas dan fungsi intelijen ini dalam kerangka untuk mengawal, mengamankan, serta menegakkan sumber hukum dan kepentingan nasional. Apalagi jika intelijen sedang melakukan operasi rahasia, maka yang perlu digarisbawahi adalah bahwa operasi tersebut merupakan operasi yang dibatasi aksesnya sesuai dengan kesepakatan yang bertanggungjawab.

Tuntutan reformasi intelijen sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2011 membuat BIN harus segera bergerak sesuai dengan fungsi yang ditetapkan di regulasi tersebut. Stereotip intelijen yang menakutkan dalam benak masyarakat harus segera diubah. Merujuk kepada fungsinya, BIN harus melambangkan kecerdasan, bukan kekuasaan atau kekuatan. BIN harus bisa menyajikan perkiraan, skenario, peringatan dan deteksi dini ancaman terhadap negara.<sup>22</sup> Dengan demikian, diharapkan dengan adanya UU ini, fungsi intelijen dapat berjalan lebih optimal dan lebih “kreatif” dalam menggali informasi guna menopang tugasnya dari mulai perkiraan, skenario, peringatan dan sebagainya.

Namun realitas di lapangan, tampaknya pimpinan intelijen negara belum melakukan fungsi seperti yang dipaparkan diatas. Justru masih ditemui masalah-masalah yang menyangkut *overlap* antar tugas dan fungsi intelijen, baik antara BIN, Bais, dan Baintelkam. Ini memperlihatkan sistem pengelolaan keamanan negara masih amburadul karena masih terdapat tumpang tindih antar institusi-institusi pertahanan, keamanan, dan intelijen negara dalam menangani kasus-kasus yang sama. Intelijen yang seharusnya menjaga keamanan negara dari ancaman negara masih memiliki Kominda, yang seharusnya ditangani oleh Baintelkam (Polri) sebagai institusi penanggung jawab keamanan dalam negeri.

Selanjutnya, di luar persoalan profesionalisme intelijen yang belum terbentuk dan upaya demokratisasi intelijen yang belum maksimal, penelitian ini juga menyoroti pentingnya efektifitas pengawasan bagi institusi intelijen. Perkembangan baru dalam konsensus internasional menunjukkan bahwa badan intelijen seharusnya tunduk pada intitusi demokratik. Tindakan ini bertujuan untuk melindungi badan-badan keamanan dan intelijen dari kepentingan politik tanpa harus mengisolasi mereka dari lingkungan eksekutif, oleh karenanya dibutuhkan pengawasan pada badan-badan intelijen yang ada.

<sup>21</sup> Hasil pengumpulan data pada *Diskusi Terbatas* “Intelijen Dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia,” Jakarta: 15-16 Oktober 2015.

<sup>22</sup> Stanislaus Riyanta, *Reformasi Intelijen Sebagai Antisipasi Pendudukan Strategis*, dalam <http://jurnalintelijen.net/2015/07/06/>, diakses tanggal 10 November 2015.

Pentingnya pengawasan intelijen ini didasari atas lima alasan: *Pertama*, bersebrangan dengan konsep keterbukaan dan transparansi yang menjadi jantung pengawasan demokratis, badan-badan keamanan dan pertahanan sering beroperasi secara rahasia. Karena kerahasiaan bisa menutupi operasi mereka dari pengamatan publik, maka menjadi penting bagi parlemen dan juga eksekutif untuk memperhatikan secara seksama operasi-operasi tersebut. *Kedua*, badan-badan keamanan dan intelijen memiliki kemampuan khusus, seperti kemampuan memasuki wilayah hak milik pribadi atau komunikasi yang dapat membatasi prinsip hak asasi manusia sehingga membutuhkan pengawasan yang ketat. *Ketiga*, pasca peristiwa 11 September 2001, perlu adanya pengawasan dari otoritas sipil terkait kegiatan restrukturisasi intelijen untuk menjawab kebutuhan akan ancaman keamanan dalam bentuk baru. *Keempat*, penilaian atas ancaman yang merupakan bagian dari fungsi intelijen merupakan titik awal kemungkinan terjadinya penyimpangan, untuk itu, pengawasan demokratik menjadi satu keniscayaan.<sup>23</sup> *Kelima*, khusus pada negara-negara yang berada pada masa transisi dari rejim otoriter ke rejim demokratik, pengawasan institusi intelijen secara demokratik menjadi keharusan. Hal ini dikarenakan, insituti-intituti intelijen pada masa lalu (rezim otoriter) biasanya berfungsi untuk melindungi pemimpin yang otoriter atau menjadi alat represif bagi masyarakatnya. Dalam kaitan ini, reformasi institusi intelijen pada masa reformasi menuntut adanya pengawasan yang ketat baik dari eksekutif, parlemen maupun masyarakat.

Pada masa lalu praktek intelijen di Indonesia dilakukan secara bebas karena mereka memiliki hak *immunity* dengan dalih bahwa prinsip pekerjaan intelijen adalah kerahasiaan. Selain itu, politisasi institusi intelijen pada masa lalu sangatlah tinggi. Pada masa Orde Baru kendali dan pengawasan terhadap badan-badan intelijen juga dilakukan secara ketat. Kendali dan pengawasan yang efektif atas badan-badan intelijen dengan sendirinya akan mengurangi distorsi informasi yang merupakan produk intelijen itu sendiri. Soeharto memposisikan dirinya sebagai pusat

<sup>23</sup> Heiner Hänggi and Theodor H. Winkler, *Challenges of Security Sector Governance*, Berlin/Brunswick: NJ; LIT Publisher, 2003.

dari seluruh komunitas intelijen yang ada, bahkan dengan berbagai cara ia juga mendirikan lembaga intelijen ekstra yudisial yang bersifat khusus, namun memiliki kekuasaan yang besar dan melebihi kewenangan lembaga intelijen yang ada.

Sementara itu pengawasan badan-badan intelijen pada reformasi mengalami pasang surut. Pada masa pemerintahan Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati, pengawasan intelijen sangatlah longgar. Hal ini dikarenakan: *Pertama*, tidak adanya aturan hukum yang mengatur batasan dan kewenangan dari badan-badan intelijen yang ada. Keputusan presiden (Keppres), Instruksi Presiden (Inpres) Keputusan Menteri, Keputusan Panglima berjalan sendiri-sendiri. Tidak ada satu aturan yang mengikat dan mengkoordinasikan kerja dari lembaga-lembaga intelijen yang ada. *Kedua*, adanya rasa nyaman dari para *end user* bahwa pimpinan badan-badan intelijen yang ada dipegang oleh orang terdekat. Dengan memegang pimpinan badan-badan intelijen yang ada para *end user* berasumsi kontrol dan pengawasan dapat dilakukan dengan baik karena produk intelijen hanya diberikan pada mereka.<sup>24</sup>

Sementara itu pada masa SBY, atas desakan dari bebgai kelompok sipil akan pentingnya pengawasan badan-badan intelijen disrepon dengan munculnya rancangan undang-undang Intelijen pada tahun 2006. Jauh sebelum RUU Intelijen versi pemerintah muncul, Kelompok kerja Reformasi Intelijen yang dikoorbadani oleh Pacivis telah menyusun draft RUU intelijen Negara versi *civil society*.

RUU Intelijen versi pemerintah segera menjadi kontroversi di kalangan masyarakat. Banyak kalangan NGO dan akademi pemerhati masalah reformasi sektor keamanan pada saat itu berpandangan bahwa ruang akuntabilitas dan pengawasan atas kerja dari badan-badan intelijen negara perlu diperbesar dengan membentuk komisi pengawasan intelijen negara di DPR. Perdebatan proses pembuatan RUU Intelijen tersebut berlangsung hingga lima tahun, hingga akhirnya pada tanggal 7 November 2011, RUU Intelijen diundangkan menjadi UU RI Nomor 17/2011 tentang Intelijen Negara. UU tersebut

<sup>24</sup> Hasil wawancara mendalam dengan narasumber, Jakarta: September 2015.

sekaligus menyetujui hadirnya sebuah komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang khusus menangani bidang Intelijen.

Kelahiran UU No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen pada dasarnya menjadi instrumen yang efektif untuk mengontrol kinerja intelijen yang tidak pernah dilakukan pada masa lalu. *Pertama*, kehadiran UU Intelijen menjadi instrumen pembatas apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh intitusi intelijen negara. Dengan adanya UU ini maka aspek pengawasan internal maupun eksternal dapat dilakukan secara efektif. Hal ini dikarenakan jika ada kegiatan maupun program yang terkait dengan masalah intelijen dapat dilakukan penindakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Demikian juga mekanisme sanksi bisa dilakukan jika kinerja intelijen dipandang menyimpang dari UU yang ada. Kedua, kehadiran UU ini sekaligus juga memisahkan fungsi intelijen dalam penindakan hukum. Ini terlihat dari pembatasan kinerja BIN (intelijen) yang hanya diarahkan sebagai *information gathering* dan detekni dini dengan dihapuskannya kewenangan intelijen untuk melakukan penangkapan dan intrograsi.

Sayangnya kehadiran UU No 17 tahun 2011 belum sepenuhnya sempurna dalam kaitannya dengan mekanisme pengawasan yang bisa dilakukan terhadap institusi intelijen di Indonesia. Beberapa problematika yang muncul terkait dengan pengawasan intelijen adalah; *Pertama*, Tidak secara nasional secara rigid dan jelas mendefinisikan apa itu keamanan nasional. Definisi yang jelas tentang keamanan nasional dapat menjadi instrumen atas batas-batas kerja intitusi dan jenis pekerjaan intelijen yang dilakukan dan menghindarkan penyalahgunaan kewenangan istimewa yang dimiliki oleh badan-badan intelijen dalam praktek sehari-hari dimana tidak ada suatu ancaman nyata terhadap negara.<sup>25</sup> *Kedua*, pembagian kewenangan pada badan-badan intelijen yang ada tidak dibarengi dengan pembagian kompetensi dan tingkatan penindakan pada masing-masing penyelenggara intelijen yang ada sehingga dimungkinkan terjadinya tumpang tindih kegiatan dan operasi atas penyelenggara intelijen yang satu dengan

<sup>25</sup> Hasil wawancara mendalam dengan narasumber, Jakarta: September 2015.

lainnya. *Ketiga*, tidak secara detil merinci pengawasan eksternal terutama yang terkait dengan intelijen kementerian. Pengawasan eksternal hanya muncul dalam satu klausul tentang pembentukan komite pengawas intelijen oleh DPR. Mekanisme kontrol anggaran juga belum ada karena dalam masalah anggaran hanya dimuat klausul tentang sumber dana badan intelijen saja.<sup>26</sup>

Hal ini diperparah dengan adanya limitasi mandat pengawasan yang diberikan oleh UU pada Komisi Pengawasan Intelijen di DPR mengakibatkan lembaga tidak memiliki kewenangan proaktif untuk mem-veto atau mengubah kebijakan serta operasi yang dilakukan oleh badan-badan intelijen yang ada. Ini dikarenakan: (1) Meskipun institusinya bersifat permanen, peran, fungsi serta tugas komisi pengawasan di DPR hanya bersifat *ad-hoc*. Pengawasan yang dilakukan oleh DPR hanya berlaku jika institusi intelijen dianggap telah melakukan penyimpangan. Di sisi lain, indikator penyimpangan yang dimasukkan dalam UU Intelijen juga tidak dijelaskan secara rinci;<sup>27</sup> (2) Tim Pengawas Intelijen Negara di DPR juga tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan atas anggaran badan-badan intelijen negara. Tidak ada satu klausulpun dalam UU No.17/2011 dan Peraturan DPR No. 2/2014 yang menyebutkan soal pengawasan anggaran badan-badan intelijen. Selain itu kewenangan tentang investigasi dan akses terhadap informasi tidak dijelaskan dengan rigid sampai pada tingkat mana invetigasi dan akses terhadap informasai intelijen dapat dilakukan oleh Tim Pengawas Intelijen Negara di DPR-RI.

Meskipun pembentukan komisi pengawas intelijen oleh beberapa kalangan dianggap positif, namun tidak sedikit resistensi terhadap lembaga ini baik dari kalangan internal maupun eksternal. Dari kalangan internal misalnya, sebagian nara sumber yang berasal dari lembaga-lembaga Intelijen mengatakan bahwa hadirnya komisi intelijen justru akan memperlambat kegiatan lembaga ini. Hal ini dikarenakan watak kerja

<sup>26</sup> Hasil wawancara mendalam dengan narasumber, Jakarta: Oktober 2015.

<sup>27</sup> Hasil wawancara mendalam dengan narasumber, Jakarta: September 2015.

intelijen adalah rahasia sementara pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPR merupakan ranah pertanggungjawaban publik. Selain itu, dengan kapasitas dan kapabilitas anggota DPR yang ada saat ini, menurut beberapa narasumber agak riskan memberikan kewenangan pengawasan intelijen kepada anggota DPR.

Unsur lain yang tidak kalah pentingnya dalam pengawasan eksternal adalah adanya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Sayangnya hal ini tidak diadopsi sama sekali dalam UU yang ada maupun praktek politik yang berlaku. Padahal pengawasan eksternal melalui masyarakat dapat menjadi pilar penting dalam proses perbaikan mekanisme kinerja maupun memperkuat deteksi dini.

## Penutup

Cukup jelas bahwa dunia intelijen kita pun tak luput dari dilema antara kerahasiaan dan keterbukaan. Konsep yang disebut terdahulu, “kerahasiaan”, dianggap sebagai ciri utama praktik intelijen (*covert*). Hampir semua kerja intelijen selalu diwarnai oleh tindakan-tindakan yang dirahasiakan. Namun, konsep yang dikatakan berikutnya, “keterbukaan”, harus dipahami sebagai konsekuensi logis dari sistem demokrasi, yang bukan hanya menuntut partisipasi dan kontestasi, melainkan juga tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel (*Good Governance*).

*Pertama*, pada umumnya memang diakui bahwa demokratisasi membawa pengaruh kepada kehidupan dan praktik intelijen di manapun, termasuk di Indonesia. Segala macam persoalan, harus didekati secara transparan dan akuntabel. Sebagai pemilik sah kedaulatan Negara, rakyat mesti diberi akses terhadap berbagai masalah yang menyangkut kepentingan publik. Memang, dunia intelijen bekerja dalam mengumpulkan informasi, menganalisis, menyelidiki, menggalang kekuatan demi keberhasilan Negara dalam mencapai kepentingan keamanan nasional. Namun, Negara di alam demokrasi, tidak diperbolehkan lagi hanya bekerja untuk dirinya sendiri, dan apalagi demi memperkuat kekuasaan politik para elitnya, melainkan demi kepentingan seluruh rakyat yang notebene pemilik kedaulatan di negeri ini.

Bila intelijen dikaitkan dengan kemanan nasional dan kepentingan negara saja, maka intelijen dan masyarakat intelijen Pasca Orde Baru boleh dikatakan telah kehilangan credonya -meski tidak sedikit eks pejabat intelijen yang secara tidak langsung mencoba membantahnya, namun umumnya mereka mengakui adanya berbagai dilema yang dihadapi lembaga di mana mereka pernah berkecimpung tersebut. Baik dalam praktik maupun para aktornya, komunitas intelijen sekarang memang harus melakukan perubahan paradigma (*paradigm shift*).

Di masa lalu, fungsi-fungsi pengamanan, penyelidikan dan penggalangan (pamlidgal), ditafsirkan hanya oleh satu pusat kekuasaan secara berjenjang dan ketat. Karena adanya jalur komando yang jelas, maka kerja intelijen terasa efektif. Oleh karena begitu efektifnya jalur komando, setiap unsur di dalamnya selalu menunjukkan kewaspadaan penuh.

Sekarang, praktik intelijen seperti di atas, tak bisa lagi dilakukan. Munculnya pusat-pusat kekuasaan baru di luar Negara, terutama partai politik dan organisasi *Civil Society*, kebebasan pers, berkembangnya media sosial, serta kian meratanya pendidikan warga, telah memperluas wilayah kerja intelijen. Pertarungan kepentingan antar berbagai kekuatan di sekitar elite Negara, menjadi salah satu penyebab dari sulitnya sistem komando dipertahankan. Kian berkembangnya kekuatan *Civil Society* dan media sosial telah berakibat pada semakin besarnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Negara. Dengan kata lain, terlalu sulit bagi Negara sekarang untuk melakukan monopoli, dan menghegemoni kekuatan di luar dirinya.

*Kedua*, secara retorika, fungsi intelijen tak ada yang berubah. –semuanya masih valid untuk dijadikan prinsip dasar kinerja intelijen. Menurut sejumlah mantan pejabat intelijen Indonesia, apa yang dilakukan oleh intelijen adalah pengumpulan (*collection*), analisis, tindakan tertutup (*covert action*) dan kontraintelijen (*counterintelligence*).<sup>28</sup> Dalam konteks ini, nampaknya tak ada beda antara di Negara otoriter

<sup>28</sup> Hasil pengumpulan data pada *Diskusi Terbatas* “Intelijen Dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia,” Jakarta: 15-16 Oktober 2015.

dengan Negara demokrasi yang terbuka. Jika memang demikian, di mana sebetulnya letak dilemanya? Apakah demokrasi telah menjadi semacam buah simalakama bagi kehidupan intelijen dan para aktornya? Dalam arti, demokrasi di satu pihak, telah berakibat pada sulitnya intelijen melaksanakan fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Namun di pihak lain, karena fungsi intelijen seperti di atas, maka, tak ada alasan bagi komunitas intelijen untuk bekerja tanpa mempertimbangkan esensi kerja intelijen di atas.

*Ketiga*, “intel juga manusia, karena itu bisa direformasi”. Meski pun tak terlalu mudah pelaksanaannya, komunitas dan badan intelijen Indonesia secara perlahan namun pasti memperhatikan tuntutan demokratisasi. Walaupun masih mengalami fluktuasi, namun secara umum proses ini telah dimulai sejak keberadaan UU Intelijen. Kekuatan pendorong lain dari demokratisasi di bidang intelijen ini juga berasal dari semakin menguatnya Gelombang Demokrasi dan kesadaran akan implementasi Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan demikian, perubahan paradigmatis di dunia intelijen itu memiliki basis komparatif-teoritik dan empirik juga.

*Keempat*, penataan ulang lembaga dan praktik intelijen di Indonesia dimaksudkan untuk lebih meningkatkan peran *early warning sistem* dalam menjaga keamanan nasional. Sebagai institusi Negara di bidang keamanan, lembaga intelijen tidak sepatutnya diabdikan untuk menjaga kepentingan rejim yang berkuasa. Sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih, kompetensi aparatur intelijen itulah kuncinya. Dengan profesionalisme intelijen sebagai ideologinya, maka kerja intelijen yang mengutamakan “ketepatan dan keakuratan” (*velox et exactus*) harus dijadikan rujukan utama para pengambil keputusan (*users*). Dengan kata lain, paradigma baru ini akan mengurangi berbagai distorsi dan bahkan manipulasi serta monopoli dan persaingan antar aparat intelijen yang selama ini terjadi. Dalam sistem pengambilan keputusan yang tidak transparan, terbuka kemungkinan adanya mekanisme di luar struktur. Dalam situasi yang demikian, faktor suka dan tidak suka atau favoritisme menjadi pemegang kendalinya.

Sebagai akibatnya, tak terlalu mengherankan bila dalam pengambilan keputusan selanjutnya, bias pribadi sang pemimpin akan mudah terlihat. Praktik intelijen semacam ini tentu saja akan menimbulkan dua kerugian sekaligus. Di satu pihak, kepentingan Negara dinomor duakan. Di pihak lain, ketergantungan pada pribadi menjadi semakin menguat. Dalam konteks kekinian, praktik semacam itulah yang dianggap sebagai tidak demokratis.

*Kelima*, terkait dengan pertanyaan bagaimana seharusnya fungsi intelijen dirancang dan diterapkan di era Pasca Orde Baru tersebut? Sesuai dengan semangat zaman yang menuntut transparansi dan akuntabilitas, praktik “intelijen hitam” sebagaimana dikenal di masa lalu, sekarang sudah harus diakhiri. Intelijen harus dikembalikan kepada fungsi dasarnya, yakni mengumpulkan informasi yang diperlukan, baik secara terbuka maupun secara tertutup. Kemudian, informasi dan data yang diperoleh tersebut digunakan untuk mendukung kepentingan nasional, bukan kehendak pribadi yang berkuasa. Mekanisme kerjanya pun harus lebih berorientasi kepada penegakan hukum, terutama HAM, bukan kekuasaan lewat cara-cara yang militeristik dan represif. Tata cara kerja intelijen yang berdasar pada “siklus intelijen” (*Intelligence Cycle*), harus benar-benar diimplementasikan. Dimulai dari tahap perencanaan, pengumpulan, pengolahan, analisis, sampai diseminasi, haruslah dilakukan dengan mengindahkan pada ketentuan hukum serta perundangan yang berlaku. Di era demokrasi, mestinya, hukum adalah segalanya, bukan kekuasaan semata.

*Keenam*, mungkinkah harapan-harapan akan reformasi intelijen sebagaimana diuraikan sebelumnya dapat terwujud? Pertama, dalam sistem politik yang masih patrimonial, kehendak pemegang kekuasaan, biasanya masih tetap dominan di dalam pengambilan berbagai kebijakan Negara, termasuk di dunia intelijen. Kedua, perubahan lembaga dan praktik intelijen juga dapat terjadi karena makin efektifnya fungsi pengawasan atasnya. Sesuai dengan perubahan sistem politik yang menjadi kian demokratis, maka prinsip-prinsip universal juga berlaku di dalam suatu Negara yang mengikutinya, termasuk Indonesia Pasca Orde Baru. Untuk

mencegah adanya penyalahgunaan prinsip kerahasiaan dari dunia intelijen, maka fungsi pengawasan menjadi mutlak adanya. Agar fungsi pengawasan ini menjadi makin efektif, maka selain adanya pengawasan internal, juga perlu dibuka adanya pengawasan eksternal. Inilah yang disebut dengan “*multilayered oversight*”. Model pengawasan yang terintegrasi ini dimaksudkan untuk mencegah adanya berbagai penyimpangan kerja intelijen. Jangan sampai, atas nama kerahasiaan dan kepentingan yang lebih tinggi (negara atau nasional), lantas mengabaikan prinsip-prinsip yang mendukung penegakan hukum.

## Referensi

### Buku

- Bergin, Anthony and Robert Hall (eds.). 1994. *Intelligence and Australian National Security*. Australian Defence Studies Centre, Australian Defence Force Academy, Canberra.
- Bhakti, Ikrar Nusa et.al. 2004. *Relasi TNI-Polri dalam Penanganan Keamanan Dalam Negeri (2000-2004)*, P2P LIPI, Jakarta.
- Fattah, Abdoel. 2005. *Demiliterisasi Tentara. Pasang Surut Politik Militer 1945-2004*. LKiS, Yogyakarta.
- Gill, Peter & Mark Phythian. 2006. *Intelligence in an Insecure World*, Polity Press, USA, 2006.
- Hanggi, H, Winkler, T (eds). 2003. *Challenges of Security Sector Governance*, NJ; LIT Publisher, Berlin/Brunwick.
- Lowenthal, Mark. M. 2009. *Intelligence: From Secret to Policy*, CQ Press, Washington DC.
- Richelson, Jeffrey T. 1999. *The US Intelligence Community*, Westview Press, (Fourth Edition).
- Soegirman, Supono. 2014. *Intelijen: Profesi Unik Orang-orang Aneh*. Media Bangsa, Jakarta.
- Widjajanto, Andi (ed.). 2005. *Reformasi Intelijen Negara*. Jakarta: Pacivis Universitas Indonesia dan Friedrich Ebert Stiftung, Jakarta.
- Widjajanto, Andi Cornelis Lay dan Makmur Keliat. 2006. *Intelijen Velox et Exactus*, Pacivis Universitas Indonesia dan Friedrich Ebert Stiftung, Jakarta.
- Widjajanto, Andi dan Artanti Wardhani. 2008. *Hubungan Intelijen-Negara 1945-2004*, Pacivis Universitas Indonesia dan Friedrich Ebert Stiftung, Jakarta.

### Jurnal

- Jemadu, Aleksius (ed). 2007. *Praktek-praktek Intelijen dan Pengawasan Demokratis-Pandangan Praktisi*, DCAF-FES SSR Volume 2, Jakarta, 2007.
- Manunta, Giovanni. 2000. *A Security Problem*, Defining Security Journal.
- Stanislaus Riyanta, *Reformasi Intelijen Sebagai Antisipasi Pendudukan Strategis*, dalam <http://jurnalintelijen.net/2015/07/06/>, diakses tanggal 10 November 2015.

### Laporan/Makalah

- Imparsial. 2005. *Evaluasi Kinerja BIN di masa transisi dan catatan untuk Reformasi*, Imparsial, Jakarta.
- Ministerial Review Commission On Intelligence Republic of Africa, 2008. *Intelligence in a Constitutional Democracy*.
- Hasil Pengumpulan Data Lapangan
- Hasil pengumpulan data pada *Diskusi Terbatas “Intelijen Dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia,”* Jakarta, 15-16 Oktober 2015.
- Hasil wawancara mendalam dengan narasumber, Jakarta, Oktober 2015.
- Hasil wawancara mendalam dengan narasumber, Jakarta, September 2015.

## TENTANG PENULIS

### **Ahmad Rizky Mardhatillah Umar**

Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana di Department of Politics, University of Sheffield dengan Program Studi MSc in Politics with Research Method. Pernah bekerja di beberapa lembaga penelitian, serta melakukan beberapa aktivitas *freelance*. Selain menempuh studi pascasarjana, juga menulis kolom untuk beberapa media. Minat Kajiannya terletak pada keterkaitan antara Gerakan Sosial dan Politik Internasional, dengan isu spesifik pada Islam Politik, Masyarakat Sipil, Regionalisme, dan Politik Identitas. Aktif sebagai Ketua Divisi Kajian Lingkaran Studi Cendekia dan Wakil Ketua PCI Muhammadiyah Inggris Raya 2015-2017. Penulis dapat dihubungi melalui *email*: armumar1@sheffield.ac.uk

### **Arwin Datumaya Wahyudi Sumari**

Penulis saat ini aktif sebagai analis Kebijakan Rencana Kontijensi Ekonomi dalam Kedeputian Politik dan Strategi, Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Gelar Doktorat diperoleh dari Institute Teknologi Bandung, jurusan Teknik Elektro dan Informasi. Penulis juga pernah bergabung sebagai peneliti di Intelligent System Research Group (ISRG) dan Signal and System Laboratory (SSL) ITB. Penulis dapat dihubungi melalui *email*: arwin.sumari@dkn.go.id atau arwin.sumari@yahoo.com

### **Awani Irewati**

Penulis adalah peneliti di bidang Perkembangan Politik Internasional, Pusat Penelitian Politik-LIPI. S1 ilmu Hubungan Internasional diselesaikan di FISIP Universitas Airlangga, Surabaya. Gelar S2 diperoleh dari Asia and International Studies di Griffith University, Brisbane, Australia. Ia menekuni kajian utama tentang perbatasan antarnegara, khususnya perbatasan laut Indonesia dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Selain itu juga melakukan kajian kajian perbatasan antara Thailand dengan negara-negara tetangganya,

serta mengkaji pendekatan konsep *connectivity* maupun *interconnectivity* di wilayah ASEAN dan sekitarnya. Penulis dapat dihubungi melalui *email*: irewatiawani@yahoo.co.id.

### **David Putra Setyawan**

Penulis adalah pemerhati masalah diplomasi pertahanan nasional dan aktif sebagai Deputi Informasi dan Komunikasi dalam Lingkaran Studi Strategis. Gelar Magister diperoleh dari Universitas Pertahanan Indonesia, Program Studi Diplomasi Pertahanan. Penulis dapat dihubungi melalui *email*: fa.davidsetyawan@gmail.com

### **Diandra Mengko Megaputri**

Penulis adalah peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI. Pendidikan S1 Hubungan Internasional diselesaikan di Universitas Katolik Parahyangan, sementara pendidikan S2 pada bidang ilmu Manajemen Pertahanan diselesaikan di Universitas Pertahanan Indonesia. Pernah aktif sebagai peneliti pada Indonesia Center for Diplomacy, Democracy, and Defense pada tahun 2012-2013. Minat kajiannya adalah isu-isu yang berhubungan dengan pertahanan, keamanan, Security Sector Reform (SSR), dan Industri Pertahanan. Penulis dapat dihubungi melalui *email*: diandramengko@yahoo.com

### **Fathimah Fildzah Izzati**

Penulis adalah peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI, anggota redaksi *Indoprogress*, dan penulis buku *Politik Serikat Buruh dan Kaum Precariat: Pengalaman Tangerang dan Karawang*. Pendidikan S1 di bidang Ilmu Politik di tempuh di Universitas Indonesia. Penulis menekuni studi-studi yang berkaitan dengan isu ekonomi politik, buruh, perempuan dan politik. Penulis dapat dihubungi melalui *email*: fildzah.izzati@gmail.com

### **Ikrar Nusa Bhakti**

Penulis adalah peneliti senior di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI). Gelar sarjana ilmu politik diperolehnya dari FISIP-UI dan gelar Ph.D di bidang Sejarah dan Politik dari School of Modern Asian Studies, Griffith University Brisbane, Australia. Beberapa kontribusi tulisannya antara lain termuat dalam buku Tentara yang Gelisah, Tentara Mendamba Mitra, Bila ABRI Berbisnis, Militer dan Politik Kekerasan Orde Baru (Penerbit Mizan, Bandung), The Fall of Soeharto, Human Security in Asia, Beranda Perdamaian: Aceh Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki (Pustaka Pelajar, Yogyakarta), serta di jurnal-jurnal ilmiah maupun surat kabar lainnya. Penulis dapat dihubungi melalui *email*: ikrar.lipi@gmail.com

### **Khanisa Krisman**

Penulis adalah peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI. Gelar S1 Hubungan Internasional diperoleh dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2010. Sementara pendidikan S2 jurusan Hubungan Internasional ditempuh di College of Asia and The Pacific, Australian National University. Ia menekuni studi-studi terkait perkembangan Information and Communications Technology (ICT), isu-isu cyber dan sosial media dalam Hubungan Internasional, serta isu-isu terkait regionalisme di Asia Tenggara dan ASEAN. Penulis dapat dihubungi melalui *email*: khanisa\_krisman@yahoo.com.

### **Nanto Sriyanto**

Penulis adalah peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI. Gelar S1 Hubungan Internasional diperoleh dari Universitas Padjajaran. Sementara pendidikan S2 ditempuh di The University of Queensland, Australia, School of Political Science and International Studies. Ia menekuni studi-studi terkait perkembangan keamanan internasional dan kawasan, politik luar negeri Indonesia serta kajian teori hubungan internasional. Penulis dapat dihubungi melalui *email*: nantosriyanto@gmail.com

### **Sandy Nur Ikfal Raharjo**

Penulis adalah peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI. Latar belakang pendidikannya adalah Ilmu Hubungan Internasional untuk S1 dan Resolusi Konflik untuk S2. Ia menekuni studi-studi pembangunan wilayah perbatasan, sengketa dan konflik perbatasan, serta isu-isu stabilitas keamanan regional. Penulis dapat dihubungi melalui *email*: sandy.raharjo@gmail.com.

# Informasi Hasil Penelitian Terpilih

